

**SKRIPSI**

**DISTRIBUSI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN LOMPOE PAREPARE  
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**



**OLEH**

**NUR AEFIH  
NIM : 19.2400.040**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**DISTRIBUSI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI KELURAHAN LOMPOE PAREPARE  
(PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)**



**OLEH**

**NUR AEFIH  
NIM: 19.2400.040**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

2023

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Nur Aefih

NIM : 19.2400.040

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Nomor: B. 1589/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.  
NIP : 19680205 200312 2 001



Pembimbing Pendamping : Umaima, M.E.I.  
NIP : 19890717 201801 2 002



Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP: 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Nur Aefih

NIM : 19.2400.040

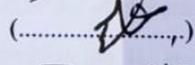
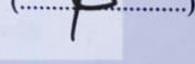
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Nomor: B. 1589/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

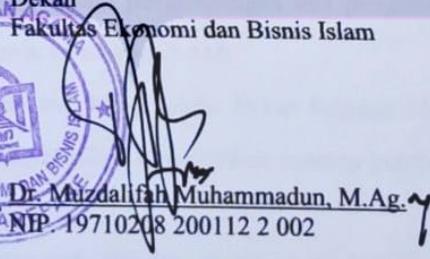
Disahkan oleh Komisi Penguji

Rusnaena, M.Ag.	(Ketua)	
Umaima, M.E.I.	(Sekertaris)	
Dr. H. Mukhtar, Lc., M. Th.I.	(Anggota)	
Bahtiar, S.Ag., M.A.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Mizdalfah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Intan dan Ayahanda H. Juhri tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah do'a tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Rusnaena, M. Ag. dan Ibu Umaima, M.E.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah

meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kedua saudara kandung tercinta Nur Atikah, S.E. dan Nur Atilah yang senantiasa telah memberi semangat, do'a dan nasihat yang tiada henti-hentinya.
5. Ibu Rezki Fani, M.M, Ibu Andi Khaerun Nisa, M.Hum, Ibu An Ras Try Astuti, M.E dan kak Hera yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
6. Sahabat tercinta, Ismi Octavia, Nur Afifah Mustafa, A.Md.T, Indah Cahyani dan Kak Nur Indah Lestari, Amd.Kep yang selalu memberi arahan dan motivasi.
7. Ridho Wira Adilaksana yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, semoga segera bertemu.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Januari 2023  
6 Rajab 1444 H

Penulis



Nur Afifah

NIM. 19.2400.040

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aefih

NIM : 19.2400.040

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 08 Juli 2001

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap  
Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Di Kelurahan  
Lompoe Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Januari 2023

Penyusun,



Nur Aefih

NIM. 19.2400.040

## ABSTRAK

**Nur Aefih**, *Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Rusnaena dan Umaima).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian PKH di Kelurahan Lompoe Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif disamping itu juga menggunakan pendekatan teologis dan fenomenologis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan cara reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa dalam mensejahterahkan masyarakat telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai prosedur yang telah ditetapkan pada pemerintah pusat, pendistribusian di Kelurahan Lompoe dapat dikatakan pendistribusiannya belum menyeluruh tetapi sudah tepat pada sasarannya dan berdasarkan perspektif ekonomi Islam belum sesuai dengan distribusi dalam Islam karena belum memenuhi dua prinsip, yaitu prinsip pemerataan dan solidaritas.

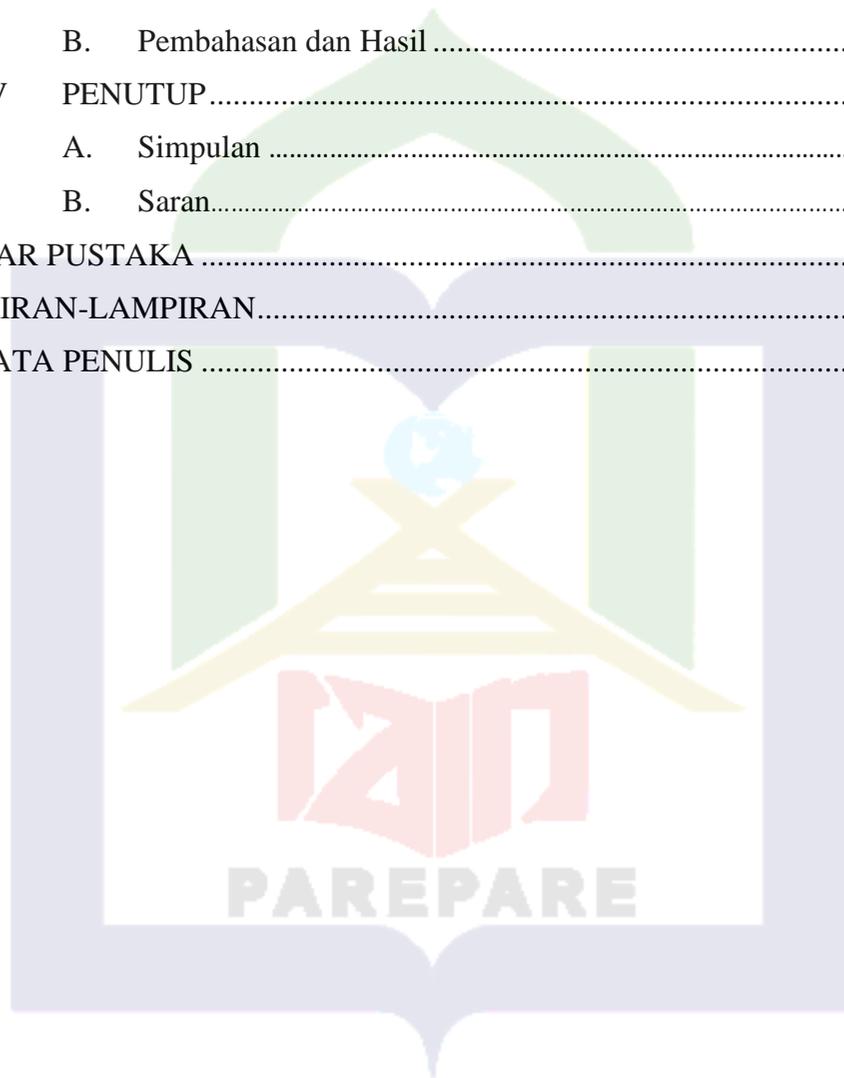
**Kata kunci: Distribusi, PKH, Kesejahteraan.**



## DAFTAR ISI

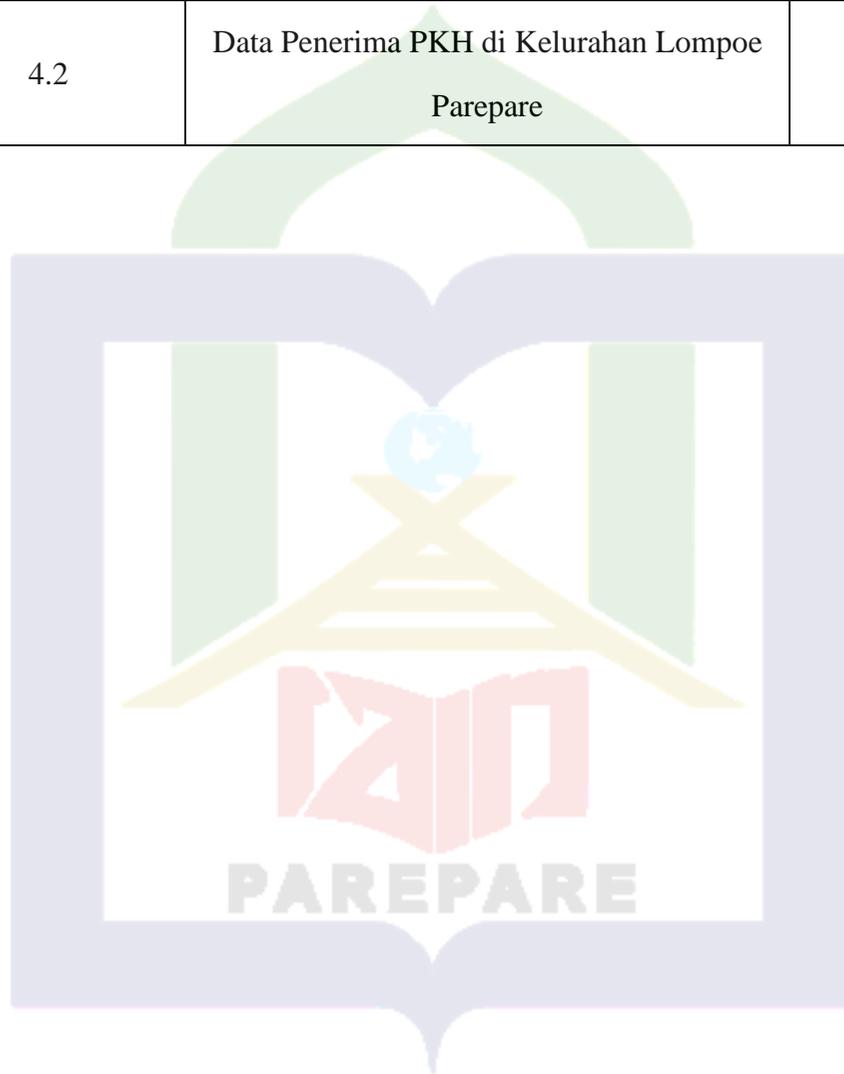
	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori .....	10
1. Program Keluarga Harapan (PKH) .....	10
2. Kesejahteraan .....	18
3. Konsep Islam Tentang Kesejahteraan.....	22
4. Konsep Distribusi dalam Islam .....	26
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir .....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	38

E.	Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data .....	38
F.	Uji Keabsahan Data .....	42
G.	Teknik Analisis Data .....	43
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	45
A.	Hasil Penelitian .....	45
B.	Pembahasan dan Hasil .....	65
BAB V	PENUTUP .....	73
A.	Simpulan .....	73
B.	Saran .....	74
	DAFTAR PUSTAKA .....	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	79
	BIODATA PENULIS .....	114



## DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
4.1	Skema Bantuan Per Tahap Penyaluran	57
4.2	Data Penerima PKH di Kelurahan Lompoe Parepare	58



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Gambar	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	80
2.	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti dari Kelurahan Lompoe Kota Parepare	82
4.	Pedoman Wawancara	83
5.	Surat Keterangan Wawancara	86
6.	Transkrip Wawancara	97
7.	Foto Dokumentasi Wawancara	101
8.	Data Penerima PKH Tahap IV	104
9.	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	113
10.	Biodata Penulis	114

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial telah menjadi tujuan utama setiap negara di dunia. Untuk mencapai suatu kesejahteraan salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh setiap belahan negara di dunia. Masalah kemiskinan ini tentu tidak hanya terjadi di negara berkembang dan tertinggal, tetapi juga dialami oleh negara maju meski terbilang jumlahnya tidak besar. Konsep kemiskinan secara umum mengartikan bahwa kemiskinan adalah keadaan seseorang atau suatu kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang nyaman atau layak, baik itu dari segi dimensi ekonomi, sosial, psikolog, dan spiritual.

Kemiskinan digambarkan layaknya sebagai kondisi seseorang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya penghasilan yang mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin tidak memiliki uang untuk mengakses berbagai layanan guna meningkatkan taraf hidup mereka. Adanya kemiskinan ini telah membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, akses ke jaminan kesehatan dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Masalah kemiskinan yang masih belum bisa terselesaikan pemerintah Indonesia belum bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih belum bisa dikatakan baik.

Pemerintah cenderung bersikap acuh tak acuh dan berdalih bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih baik dibuktikan dengan banyaknya pelajar Indonesia yang mampu meraih prestasi dalam perlombaan tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah perlu memperhatikan adanya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah pelajar Indonesia yang putus sekolah masih sangat tinggi. Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dan pendidikan di Indonesia, pemerintah mengadakan berbagai program yang berlaku secara nasional. Adanya program-program tersebut diharapkan mempercepat pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pembangunan tersebut ditujukan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata sesuai yang diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV.

Program yang sampai saat ini menjadi program unggulan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dalam hal komponen, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia *Conditional Cash Transfer (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.<sup>1</sup> Program bantuan sosial bersyarat penerima PKH memberikan akses kepada keluarga miskin terutama pada ibu hamil untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan bagi anak usia sekolah, selain itu manfaat Program Keluarga Harapan ini juga mulai mendorong cakupannya kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia. Tujuan utama PKH ini

---

<sup>1</sup> <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik yakni 26,36 juta orang.<sup>2</sup>

Riset *independent* Kementerian Sosial dan Bill & Melinda Gates Foundation menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Indonesia mencapai 93,2%. Program Keluarga Harapan memberikan dampak positif lain yang dapat dinikmati para keluarga penerima manfaat seperti kesehatan, pendidikan dan akses layanan keuangan melalui lembaga keuangan resmi.<sup>3</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di Sulawesi Selatan sudah ada sejak 1 Juni 2010. Program tersebut telah banyak membantu masyarakat Sulawesi Selatan dan memberikan kontribusi yang pada dasarnya dibutuhkan masyarakat. Program pemerintah ini pun digalakkan di kota Parepare tepatnya di kelurahan Lompoe dimulai sejak tahun 2013. Kelurahan Lompoe memiliki luas wilayah 5,66 km<sup>2</sup> dan terbagai menjadi 10 RW dan 26 RT dengan jumlah KK 3.230. Data kemiskinan di kelurahan Lompoe sebanyak 950 jiwa dan 239 KK, sementara jumlah penduduk 11.375 jiwa serta jumlah penerima bantuan sebanyak 159 keluarga penerima manfaat.<sup>4</sup>

Berdasarkan data kemiskinan dan penerima PKH di kelurahan Lompoe, masih banyak keluarga yang belum mendapatkan bantuan PKH dan tentunya ingin diketahui lebih lanjut apakah penerapannya sudah maksimal atau belum secara pendistribusiannya. Perlu adanya bantuan PKH agar keluarga sangat kurang mampu tersebut dapat menjalankan atau melaksanakan dana pemerintah sesuai dengan

---

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id>

<sup>3</sup> Indah Cahyani, Nurul Ainun & Nur Aefih, *Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan di Kelurahan Lompoe Kota Parepare*, (Riset Ekonometrika; Institut Agama Islam Negeri Parepare: Parepare, 2021) h. 6-7.

<sup>4</sup> Data Kelurahan Lompoe Parepare (20 Mei 2022).

prosedur yang telah dilaksanakan, seperti menyekolahkan anak dan mengutamakan Kesehatan, maka pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan arahan kepada keluarga yang sangat kurang mampu terkait dengan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menanggulangi kemiskinan yang menjadi prioritas utama telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah dilakukannya, berangkat dari itu masih banyak penduduk miskin di Kelurahan Lompoe yang belum mendapatkan bantuan PKH jika dilihat dari data Kelurahan Lompoe. Seperti yang kita ketahui, penanggulangan dan pengawalan bagi masyarakat yang kurang mampu bukanlah hal yang mudah untuk diatasi secara cepat, mengingat kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yaitu situasi yang dimana dialami oleh suatu bangsa dan terdapat berbagai macam konflik baik itu konflik kecil hingga konflik yang besar, baik itu di bidang politik, sosial, ekonomi dan moral.

Masalah yang muncul dikarenakan adanya pendistribusian yang tidak merata pada masyarakat yang membuat penyalurannya pun tidak tepat pada sasaran sebagaimana mestinya yang telah didata oleh pihak kelurahan dan tentunya perlu ditindaklanjuti. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apakah benar adanya dan masih terjadi hal seperti itu, berangkat dari hasil observasi dan wawancara beberapa masyarakat Kelurahan Lompoe, Parepare.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, sehingga dapat ditentukan rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lompoe Parepare dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare?
3. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan tujuan dilakukannya penelitian

ini:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lompoe Parepare.
2. Untuk mengetahui pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare.
3. Untuk mengetahui Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi penambah kepustakaan di bidang ekonomi syariah dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan PKH untuk lebih maju lagi dan mensejahterakan masyarakat serta mendistribusikan bantuan pada sasaran sebagaimana mestinya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi informasi yang penting dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan Program Keluarga Harapan



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Syahriani, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar Tahun 2016, Makassar dengan judul skripsi, *“Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”*.

Penelitian ini membahas tentang kontribusi atau sumbangsiah yang dimaksud disini adalah sumbangsiah yang diberikan oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk para Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Bantuan yang diberikan harus sesuai dengan RTSM yang memiliki kriteria, yaitu salah satunya di bidang pendidikan. Jadi dalam observasi dan penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kontribusi PKH dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Syahriani, Judul Skripsi, *“Kontribusi Program Keluarga Harapan dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu”*, (Skripsi Sarjana; Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial: Makassar 2016), h. vi.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti berada pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif, dengan objek yang dituju adalah peserta dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lokasi tersebut. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas menjelaskan kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu. Sedangkan penulis menjelaskan tentang tingkat kesejahteraan dan pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Kartiawi (2017) dengan judul skripsi “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan)*”.

Penelitian ini mengatakan bahwa, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, efektivitas PKH yang diukur melalui lima indikator yaitu: masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak. Ada dua indikator yang tidak terpenuhi oleh PKH di kampung Bonglai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: tidak tepatnya penentuan RTSM penerima bantuan dalam mengelola/mengalokasikan dana PKH yang diterima. Sehingga PKH yang berjalan selama empat tahun di Kampung Bonglai masih kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kampung Bonglai karena masih banyak penduduk miskin yang belum *tercover* oleh PKH. Dilihat dari ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung jawab dan tafakul, dalam implementasinya PKH baru hanya sebatas bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat sedangkan nilai keadilan dan

tanggung jawab dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan sehingga PKH dapat terlaksana secara efektif.<sup>6</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti berada pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif, dengan objek yang dituju adalah peserta dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lokasi tersebut. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu. Penelitian diatas menggunakan teknik penyebaran angket, sedangkan penulis tidak menggunakan teknik tersebut.

3. Febrina Eka Putri, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019, Pekanbaru dengan judul skripsi “*Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Menurut Ekonomi Islam*”.

Penelitian ini mengatakan bahwa, penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Agar memperoleh bantuan PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH sendiri memiliki tujuan umum untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi

---

<sup>6</sup> Kartiawi, “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*” (Studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Kanan)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung, 2017), h. ii.

beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang, sebab peningkatan kualitas kesehatan pendidikan dan terpilihnya taraf penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas diri.<sup>7</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti berada pada metode penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif, dengan objek yang dituju adalah peserta dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lokasi tersebut. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian di atas menjelaskan tentang penerapan Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan penulis menjelaskan tentang distribusi PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi acuan teori dalam menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Adapun tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

### **1. Program Keluarga Harapan (PKH)**

#### **a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam

---

<sup>7</sup> Febrina Eka Putri, Judul Skripsi, “*Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Menurut Ekonomi Islam*”. (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum: Riau Pekanbaru, 2019), h. i.

percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan membuka akses KPM ( Keluarga Penerima Manfaat) bagi ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan yang tersedia di dekat tempat tinggal mereka.<sup>8</sup> Program Keluarga Harapan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat yang perekonomiannya kurang mampu dan dapat membantu masyarakat agar terlepas dari rantai kemiskinan. Program ini diharapkan agar masyarakat yang menerima KPM dapat mempergunakan fasilitas/pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah sebaik-baiknya.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang diterapkan sebagai peserta PKH.<sup>9</sup> Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan komponen persyaratan peserta PKH penerima bantuan sosial langsung dan sudah terdaftar dalam program DTKS. Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DTSK dan merasa dirinya kurang mampu itu tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1. Yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial

---

<sup>8</sup> Ditektorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, h.7.

<sup>9</sup> Ditektorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, h. 18.

bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>10</sup> Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang yang disalurkan kepada KPM kepada keluarga atau orang miskin, tidak mampu atau rentan terhadap resiko sosial. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga atau orang miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH. Pendamping sosial PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis pengolahan data di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.<sup>11</sup> Bantuan PKH ini sudah jelas arah dan ditujukan kepada siapa (yang bersangkutan) maka diharapkan agar tidak akan terjadi penyaluran distribusi yang tidak tepat pada sasarannya.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, h. 3.

<sup>11</sup> Dittektorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, h. 19.20.

<sup>12</sup> Dittektorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, h. 22.

- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan Kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pemanfaatan bantuan sosial yang diterima oleh peserta PKH dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan PKH.

c. Kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Penerima Program Keluarag Harapan (PKH) dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut:<sup>13</sup>

1) Komponen Kesehatan

Kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen Kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Ibu Hamil/ Nifas/ Menyusui

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan

<sup>13</sup> Dittektorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, h. 22-23.

atau berada dalam masa menyusui.

b) Anak Usia Dini

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah).

2) Komponen Pendidikan

Kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTS sederajat, atau SMA/MA sederajat.

3) Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

a) Lanjut Usia

Seseorang berusia lanjut mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

b) Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang Disabilitas Berat adalah peyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

Kriteria diatas sudah sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan pada penerima bantuan Program Keluarga Harapan dan akan diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan komponen tersebut.

d. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

1) Hak Kewajibab Keluarga Harapan (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga berhak mendapatkan:<sup>14</sup>

- a) Bantuan sosial PKH;
- b) Pendampingan sosial PKH;
- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial; dan
- d) Program bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2) Kewajiban Keluarga Harapan (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

Kewajiban KPM Program Keluarga Harapan (PKH) pada kondisi Normal terdiri dari:<sup>15</sup>

- a) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/infas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan

<sup>14</sup> Dittektorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementrian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, h. 24.

<sup>15</sup> Dittektorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementrian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, h. 24-25.

Kesehatan pada fasilitas/layanan Kesehatan sesuai dengan protocol Kesehatan;

- b) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif;
- c) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan;
- d) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
- e) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

Hak dan kewajiban penerima PKH harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada poin-poin yang telah dicantumkan diatas. Apabila ada yang tidak menerima hak dan kewajiban tersebut perlu ditindaklanjuti sebaliknya apabila penerima KPM ada yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai poin (e) yang berlaku diatas.

e. Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Ditektorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, h. 29-30.

- 1) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial
  - a) Rekening penerima bantuan sosial dibukakan secara kolektif secara terpusat sesuai data yang telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur.
  - b) Pembukaan rekening diikuti dengan pencetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera serta PIN Mailer.
- 2) Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan aktivitas untuk menyampaikan suatu informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh Kemensos RI bersama Bank Penyaluran dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 3) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM

Bank penyalur melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN Mailer kepada penerima manfaat PKH. Untuk kelancaran pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.
- 4) Proses Penyaluran Bantuan Sosial KPM

Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank penyalur.
- 5) Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH

Penarikan dana bantuan sosial PKH adalah kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di

layanan yang disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen Bank dan e-warong.

6) Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Kegiatan pencocokan dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank penyalur. Kegiatan pengecekan data penyaluran dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH pada setiap KPM PKH yang telah menerima bantuan ataupun yang belum menerima bantuan. Pada saat pengecekan data penyaluran KPM, SDM PKH memberikan informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan. SDM PKH memberikan informasi penyebab KPM tidak dapat melakukan informasi penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

7) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Bantuan sosial kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pelaksana PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM.

## 2. Kesejahteraan

### a Pengertian Kesejahteraan

Teori kesejahteraan (*Welfare Theory*) pada umumnya diadopsi dari teori Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation (1776)*, bahwa individu memiliki hasrat untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. Dengan kecenderungan individu untuk selalu berusaha memuaskan keinginannya, maka

kesejahteraan akan dicapai pada saat kepuasan mencapai tingkat optimum. Kesejahteraan dapat dipandang dalam dua sisi, yakni sisi rumah tangga konsumen dan sisi yang lain pada sisi rumah tangga produsen. Pada rumah tangga konsumen tingkat kesejahteraan itu diukur dari tingkat kepuasan individu dalam memakai atau menghabiskan nilai guna barang (*utility*). Sementara itu di sisi produsen, tingkat kepuasan itu diukur dari tingkat keuntungan atau dikenal juga dengan beberapa istilah diantaranya *surplus*, *benefit*, laba yang akan diperoleh produsen pada yang akan diperoleh produsen pada saat menambah satu input produksi, atau dikenal dengan istilah *marginality*.<sup>17</sup>

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).<sup>18</sup> Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.<sup>19</sup>

Seseorang dapat dikatakan sejahtera ketika mereka memiliki semua yang mereka inginkan, bukan yang mereka butuhkan. Banyak yang salah mendefinisikan pengertian dari sejahtera, hidup sederhana dan berkecukupan itu

---

<sup>17</sup> Yulhendri, “Analisis Konfirmatory Faktor Pengukuran Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga”, (Jurnal Ilmiah Econosains Vol. 15 No. 2 Agustus 2017), h. 188-190.

<sup>18</sup> Poerwadarminto, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: 1999), h. 887.

<sup>19</sup> Anwar Abbas, “Bung Hatta dan Ekonomi Islam”, (Jakarta: 2008), h. 166.

sudah bisa dikatakan sejahtera. Sejahtera sebenarnya terletak pada diri seseorang apabila mereka paham akan hal itu dan mensyukurinya. Usaha untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan tidak bisa dilepaskan dari penggolongan keluarga sejahtera, sehingga keluarga sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya yang utama dan pertama. Untuk mendapatkan gambaran tentang klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkatan keluarga sejahtera.

b. Indikator Kesejahteraan

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), indikator tingkat kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera (sering dikelompokkan sebagai sangat miskin)

Belum memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

a. Indikator Ekonomi

- 1) Makan dua kali atau lebih sehari.
- 2) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas.
- 3) Bagian luas lantai rumah bukan dari tanah.

b. Indikator Non-Ekonomi

- 1) Melaksanakan ibadah.
- 2) Bila anak sakit dibawa kesarana Kesehatan.
- 3) Keluarga sejahtera I (Sering dikelompokkan sebagai miskin)

a. Indikator Ekonomi

- 1) Paling kurang satu kali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.

- 2) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
  - 3) Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni
- b. Indikator Non-Ekonomi
- 1) Ibadah teratur.
  - 2) Sehat tiga bulan terakhir.
  - 3) Punya penghasilan tetap.
  - 4) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf.
  - 5) Usia 6-15 tahun bersekolah.
  - 6) Anak lebih dari dua orang.

## 2. Keluarga Sejahtera II

Keluarga sejahtera II adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

- a. Memiliki tabungan keluarga.
- b. Makan bersama sambil berkomunikasi.
- c. Rekreasi bersama 6 bulan sekali.
- d. Meningkatkan pengetahuan agama.
- e. Menggunakan sarana transportasi.

## 3. Keluarga sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- a. Memiliki tabungan keluarga.
- b. Makan bersama sambil berkomunikasi.
- c. Reakeasi bersama 6 bulan sekali.
- d. Meningkatkan pengetahuan agama.

- e. Menggunakan sarana transportasi.

Belum dapat memenuhi beberapa indikator meliputi:

- a. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur.
- b. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

#### 4. Keluarga Sejahtera III Plus

Sudah dapat memenuhi indikator meliputi:

- a. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur.
- b. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.<sup>20</sup>

### 3. Konsep Islam Tentang Kesejahteraan

#### a. Ekonomi dalam Islam

Pada dasarnya tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Tujuan utama syariat Islam menurut As-Shatibi adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak lima kemaslahatan yaitu: keimanan (*ad-dien*) ilmu (*al-ilm*) kehidupan (*an-nafs*) harta (*al-maal*). Ekonomi Islam tidak hanya sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik, material dari individu masyarakat dan negara saja, tetapi memperhatikan pula pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Keimanan akan turut membentuk sikap, pengambilan keputusan dan perilaku yang mengarah pada perwujudan masalah

---

<sup>20</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran*, (Jakarta: 2017), 28-30.

untuk mencapai falah. Untuk mewujudkan maslahat harus melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam sehingga akan terbentuk suatu peradaban yang luhur. Semua itu dapat dicapai jika manusia hidup dalam keseimbangan.

b. Moral sebagai Pilar Ekonomi Islam

Moral menempati posisi yang sangat penting dalam ekonomi Islam, sebab tujuan akhir dari ajaran Islam adalah membentuk pribadi yang memiliki moral baik (*akhlaqul karimah*). Untuk menyederhanakan moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Nilai ekonomi Islam.

Nilai merupakan kualitas atau kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Nilai juga mencerminkan pesan-pesan moral yang dibawah dari suatu kegiatan seperti kejujuran, keadilan, kesantunan dan sebagainya.

2) Prinsip ekonomi Islam.

Prinsip merupakan suatu mekanisme kelompok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.

c. Nilai-nilai Universal Ekonomi Islam

Adapun nilai-nilai universal dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1) Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dalam Islam semua yang diciptakan Allah memiliki manfaat dan tujuan. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada-Nya.

2) Adil

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Secara garis

besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadilan dimana terdapat persamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak dan lain sebagainya. Tanpa adanya rasa keadilan manusia akan terkelompok-kelompokkan dalam berbagai golongan. Harapan yang diinginkan dari rasa adil ini adalah para pelaku ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain dan merusak alam sekitarnya.

Berdasarkan kategori ada beberapa pengertian berkaitan dengan keadilan di dalam Al-Qur'an dari akar kata adil tersebut, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjaga hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan Al-Qur'an agar manusia memenuhi janji, tugas, dan amanat yang dipikulnya, melindungi golongan yang menderita, lemah dan kekurangan, secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam segala hal, dan seterusnya. Fase terpenting dari pada wawasan keadilan yang dibawahkan oleh Al-Qur'an itu adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar sebagai acuan etika atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim di hari perhitungan (*yaum al-hisab*) kelak. Sikap adil tidak hanya dituntut bagi kaum muslim saja tetapi juga mereka yang beragama lain. Itupun tidak hanya dibatasi sikap adil dalam urusan-urusan mereka belaka, melainkan juga dalam kebebasan mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran agama.

#### d. Kesejahteraan dalam Islam

Sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat dan (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan berhubungan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulullahan nabi Muhammad SAW. pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan yang komprehensif tentang kehidupan ini.

Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian yaitu:

##### 1) Kesejahteraan *Holistic* dan Seimbang

Kecukupan materi yang didukung terpenuhinya kebutuhan spritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri dari unsur fisik juga jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individu sekaligus sosial. Manusia akan merasa Bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

##### 2) Kesejahteraan di Dunia dan di Akhirat

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan diakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat di capai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan dunia.<sup>21</sup>

Bentuk kesejahteraan prespektif Islam, tentu dalam hal ini tidak bisa dilepaskan

---

<sup>21</sup> P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008) h. 4.

tolak ukur pedoman umat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an secara tegas sekali menyatakan, bahwa kebahagiaan itu tergantung kepada ada atau tidak adanya hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia sendiri. Bahwa Islam tidak menerima untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap yang mencakup garis yang harus dipatuhi oleh tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau kelompok.

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan dunia dan akhirat merupakan tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, kesenangan atau kenyamanan, dan kemewahan.<sup>22</sup> Dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhidar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak saudara, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah swt. kepada Adam.

#### 4. Konsep Distribusi dalam Islam

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut pada dasarnya menciptakana faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak mili.<sup>23</sup> Muhammad Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa, ilmu ekonomi tidak

---

<sup>22</sup> Adiwarmen A. Karim, "*Ekonomi Mikro Islam*", Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 62.

<sup>23</sup> M. Fuad, *et al., eds., Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 129.

pernah bisa sejalan dengan Islam. Hal tersebut dikarenakan keduanya berasal dari filosofi yang berbeda yaitu, satu anti Islam dan lainnya Islam. Perbedaan pandangan tersebut berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi.<sup>24</sup> Muhammad Baqir Al-Sadr mengatakan bahwa, segala sesuatunya sudah diukur dengan sempurna. Allah SWT telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia.<sup>25</sup>

Menurut ilmu ekonomi, masalah dari ekonomi muncul akibat karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Muhammad Baqir Al-Sadr pun mengemukakan pendapatnya, bahwasannya ia menolak pernyataan tersebut dikarenakan Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Muhammad Baqir Al-Sadr menggunakan dasar dalil pada Q.S Al-Qamar (54) ayat 49:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Terjemahnya:

Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.<sup>26</sup>

Berdasarkan potongan ayat di atas dapat disimpulkan bahwasannya, segala sesuatu telah terukur dengan sempurna dan Allah SWT sebenarnya telah memberikan sumber daya yang cukup bagi manusia di dunia sehingga, kembali lagi pada manusianya bagaimana cara mereka mengelola, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah SWT di dunia ini.

---

<sup>24</sup> Baqir Al-Hasani and Abbas Mirakhor, *Essay On Iqtishad The Islamic Approach To Economic Problems*, (Silver Spring USA: NUR, 1998/1440 H), h. 21-23.

<sup>25</sup> Muhammad Baqir Al-Sadr, *Iqtishaduna (Our Economics) Discovery Attempt On Economic Doctrine In Islam*, (Teheran: WOFIS, 1983 M/ 1403 H).

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 528.

Muhammad Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul akibat adanya distribusi yang tidak adil dan tidak merata. Distribusi tersebut terjadi akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Pihak yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya, sehingga pihak yang kuat akan menjadi semakin kaya. Sedangkan, pihak yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya, sehingga pihak yang lemah menjadi semakin miskin. Hal tersebut yang menjadi latar belakang munculnya masalah ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas dan rasa ketidakpuasan yang tidak pernah habis.

Kegiatan distribusi tidak hanya membagi-bagikan atau menyalurkan barang, tetapi distribusi meliputi kegiatan perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, penanggulangan resiko sampai barang dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan baik. Jadi, ruang lingkup distribusi mencakup seluruh penanganan barang mulai sejak lepas dari produsen hingga barang tersebut dapat diterima oleh konsumen. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan distribusi adalah usaha dalam menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen.<sup>27</sup> Kegiatan distribusi sebagaimana diketahui hak dan kewajiban milik orang lain harus diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi untuk yang bertugas menyalurkan PKH yang telah diamanahkan sudah semestinya menyampaikan hak kepada KPM tersebut sesuai pendistribusian pada DTKS.

Islam telah memberikan tuntunan kepada para pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat berkenaan dengan kegiatan distribusi. Tuntunan tersebut tertuang dalam *fiqh al-mu'amalah* menetapkan kaidah hukum bahwa, hukum asal *mu'amalah* yang

---

<sup>27</sup> Suradjiman, "Ekonomi 1 Untuk Sekolah Menengah Umum", (Jakarta: Pusat Pembukuan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), h. 38.

berbentuk kegiatan distribusi adalah boleh. Kegiatan dsitribusi dikatakan tidak boleh sampai terdapat *nash* Al-Qur'an yang mengharamkannya. Jadi, kegiatan distribusi dalam prespektif Islam adalah kegiatan yang boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan dari *nash* Al-Qur'an. Selain itu, dalam *fiqh al-mu'amalah* juga menetapkan bahwa, segala transaksi mengenai kegiatan distribusi boleh dilakukan dengan cara apapun berdasarkan kebiasaan yang baik dan benar (*'urf shahih*) yang sedang berjalan di tengah kehidupan manusia.<sup>28</sup>

Distribusi berdasarkan prespektif Muhammad Baqir Al-Sadr terbagi menjadi dua hal. *Pertama*, distribusi pra produksi (mentahannya). Distribusi pra distribusi adalah distribusi sumber daya alam yang terdiri dari empat kategori. Empat kategori tersebut, yaitu: tanah, mineral (tambang), aliran air (sungai), dan kekayaan alam lainnya. Berikut penjelasan mengenai distribusi pra produksi yang merupakan faktor produksi alami yang terdiri dari empat kategori, yaitu:

- a. Tanah, mineral yang terkandung dalam perut bumi (batu bara, belerang, emas, minyak dan lain sebagainya).
- b. Aliran air (sungai), dan sisanya.
- c. Berbagai kekayaan alam lainnya yang terdiri atas kandungan laut (mutiara dan hewan-hewan laut), kekayaan yang ada dipermukaan bumi (hewan dan tumbuh-tumbuhan), kekayaan yang tersebar diudara (burung dan oksigen), kekayaan alam yang berbunyi (air terjun yang bisa menghasilkan tenaga listrik yang dapat dialirkan melalui kabel ke titik manapun), juga kekayaan alam lainnya, serta

---

<sup>28</sup>A. Djazuli dan Yadi Janwari, H. A, "*Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 32.

- d. Faktor keturunan berupa modal dan kerja, kesemuanya itu merupakan kekayaan yang diperlukan dalam proses produksi.

*Kedua*, distribusi pasca produksi. Distribusi pasca produksi menekankan pada distribusi pendapatan atau kompensasi dan kekayaan dalam Islam. Distribusi pasca produksi adalah distribusi yang menekankan pada teori pendapatan dalam prespektif Islam, yaitu teori kompensasi dan bagi hasil. Misalnya, seseorang berhak mendapatkan kompensasi atau pendapatan atas barang yang digunakan seseorang juga berhak mendapatkan bagi hasil dari ikut sertaannya dalam proses produksi.<sup>29</sup>

Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr negara turut berperan serta dalam perekonomian. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjamin arah produksi sosial yang cepat serta untuk menjalankan distribusi dengan kesetaraan. Negara juga diharapkan dapat memberikan jaminan agar teciptanya *standar of living* yang seimbang bagi setiap individu dan dapat tercipta distribusi yang merata. Diketahui, negara dipandang sebagai pengendali serta pengawas perputaran distribusi kekayaan dengan batas-batas serta kondisi tertentu dan negara juga memiliki peran penting untuk mewujudkan terlaksananya jaminan sosial bagi semua individu.

Inti dari pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr negara adalah *icon* utama dan memiliki peran yang sangat penting yaitu dengan menciptakan dan menjaga keadilan sosial. Dalam hal ini, negara harus menetapkan standar hidup yang dimana bisa dijadikan sebuah acuan untuk menciptakan keadilan sosial yang merata. Muhammad Baqir Al-Sadr juga berpendapat bahwa, pemerintah memainkan peran yang penting dan dinamis dalam melakukan implementasi melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menghadapi tantangan pada era modern saat ini. Islam memberikan

---

<sup>29</sup> Novie Andriani Zakariya, Jurnal “*Distribusi Prespektif Muhammad Baqir Al-Sadr*”, (Surabaya: Program Studi Magister Ekonomi Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya), h.23.

solusi mengenai masalah tersebut dengan cara pemerintah dapat menyediakan sistem jaminan sosial. Muhammad Baqir Al-Sadr juga berpendapat bahwa, Islam menekankan standar hidup manusia yang lebih tinggi melalui larangan dalam berbuat berlebihan atau boros dalam artian kita sebagai makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT yang paling sempurna dan memiliki akal sehat, dianjurkan untuk hidup hemat.<sup>30</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai hal perekonomian dan melarang umatnya berbuat pemborosan secara berlebih-lebihan.

Adapun yang menjadi tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Meyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
- b. Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen.
- c. Tercapainya pemerataan produksi.
- d. Menjaga kontiunitas produksi.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.meningkatkan nilai guna barang dan jasa.<sup>31</sup>

Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggap produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan dimuka bumi mencari Sebagian dari karunia Allah, dan memperbolehkan orang-orang memiliki modal untuk berdagang tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan
- b. Kepentingan masyarakat.

---

<sup>30</sup> Novie Andriani Zakariya, Jurnal : *Distribusi Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr*, (Januari 2020), h. 26-27.

<sup>31</sup> Muh. Baqir Ash-Shadr, "*Induk Ekonomi Islam*",( Zahra: Jakarta), 2008, h. 434.

- c. Antara dua penyelenggara muamalat tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab dan qabul dalam akad-akad.
- d. Tetap berpengaruh rasa cinta dan lemah lembut
- e. Jelas dan jauh dari perselisihan.<sup>32</sup>

Adapun prinsip-prinsip distribusi dalam Islam:

- a. Prinsip keadilan dan pemerataan.
- b. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang.
- c. Prinsip solidaritas sosial.<sup>33</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam proposal ini, dan dengan maksud mempersatukan persepsi antara penulis dengan pembaca maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

#### 1. Distribusi Program Keluarga Harapan

Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Muhammad Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa, masalah ekonomi muncul akibat adanya distribusi yang tidak adil dan tidak merata. Hal ini terjadi karena ketimpangan ekonomi kepada masyarakat dan biasanya keikutsertaan campur tangan orang lain didalamnya. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah penting pada pendistribusian agar kiranya masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan seperti halnya PKH dan semacamnya dapat tersalurkan dengan sebagaimana mestinya.

---

<sup>32</sup> Euis Amalia, “*Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.363.

<sup>33</sup> Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 150.

## 2. PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah sosial untuk bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima PKH. PKH ini sangat berperan penting untuk meringankan beban masyarakat, dengan adanya PKH masyarakat RTSM bisa melangsungkan hidupnya dengan selayaknya. PKH ini memiliki 4 komponen yang diantaranya; kesehatan, pendidikan, lansia 70 tahun keatas, penyandang disabilitas berat. Pencairan dana PKH bisa dua sampai empat dalam satu tahun. Tujuan utama dari PKH ini tidak lain untuk meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia sebagai sumber utama permasalahan yang kian redup, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lompoe sudah ada sejak tahun 2007. Dimana pada tahun 2007 adalah awal pendataan nama-nama masyarakat penerima PKH. Pada tahun 2010, nama-nama masyarakat yang telah didata baru terbit dan di distribusikan ke masyarakat penerima PKH.

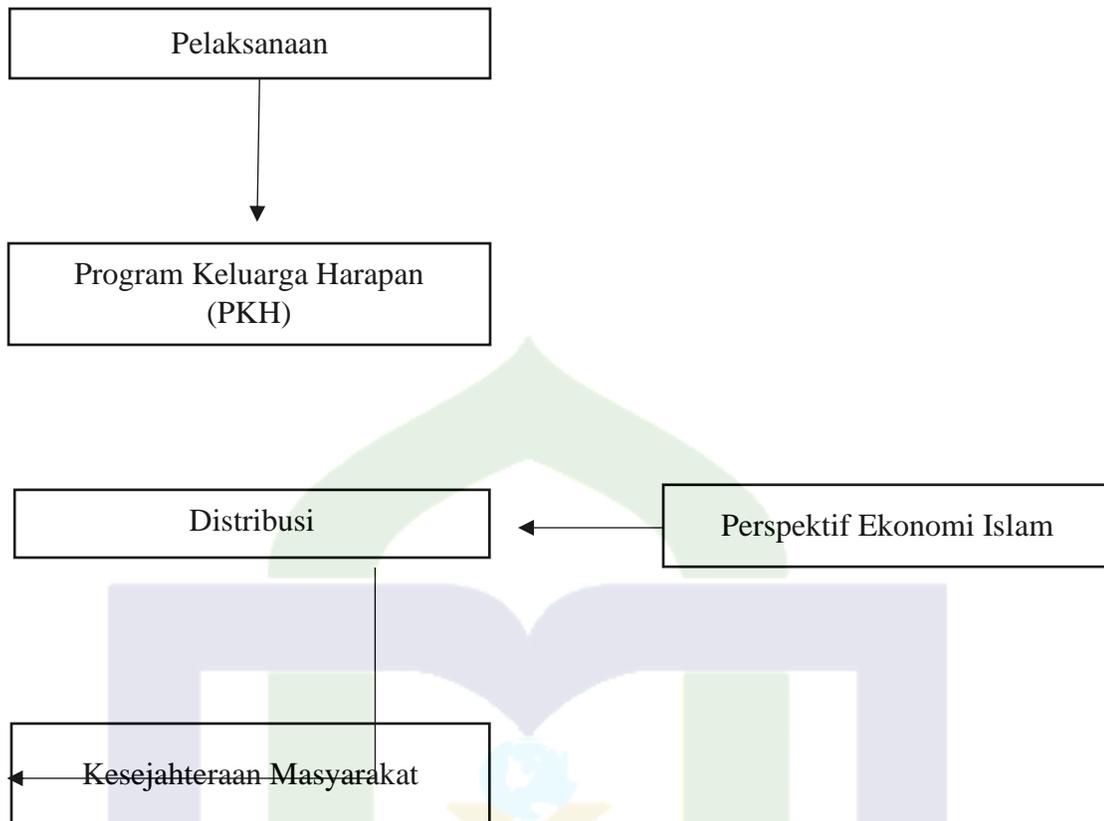
## 3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan sesuatu hal yang ingin dimiliki semua orang untuk kebahagiaan dirinya seperti keadaan yang baik, makmur, damai dan aman dari segala masalah (kesukaran). Namun, sederhananya kesejahteraan bisa didefinisikan hidup dengan berkecukupan dan kebutuhan terpenuhi serta terhindar dari beban utang. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik itu kebutuhan akan makanan, air minum yang bersih, tempat tinggal, pakaian, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang keberlangsungan hidupnya. Dalam meningkatkan kesejahteraan sudah semestinya para individu tidak terlalu berharap pada bantuan

pemerintah, tetapi juga harus dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya.

#### **D. Kerangka Pikir**

Berdasarkan proposal yang membahas tentang Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuna Di Kelurahan Lompoe Parepare, kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis untuk berfikir dalam menguraikan masalah-masalah yang dibahas dalam proposal ini. Bagan kerangka pikir yang disajikan di bawah ini, peneliti menguraikan masalah Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuna Di Kelurahan Lompoe Parepare, dengan mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan distribusi. Sehingga akan mudah memberikan solusi terhadap permasalahan distribusi yang dihadapi dengan melihat dari sudut pandang prespektif dalam Islam. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas penulis dapat menguraikan bahwasannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lompoe dimulai pada awal 2013. Program Keluarga Harapan (PKH) ini diberikan kepada Penerima Keluarga Manfaat (PKM) yang sebelumnya telah terdata di Data Keluarga Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian, pemerintah menyalurkan atau mendistribusikan kepada masyarakat melalui kelurahan masing-masing dengan pendampingan PKH. Setelah semuanya telah di distribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM) penulis ingin mengetahui apakah program dari pemerintah tersebut dapat mensejahterahkan masyarakat dan penulis ingin meneliti apakah pendistribusian tersebut telah sesuai dengan pandangan prespektif ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif disamping itu juga menggunakan pendekatan teologis dan fenomenologi. Pendekatan teologis memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam pendidikan Islam pendekatan ini dipakai dalam rangka menggali sumber-sumber atau dalil-dalil yang dalam agama (Al-Qur'an dan Hadis).

Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi, karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia terorganisir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan "fakta" atau "penyebab".

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian factual dan sistemasi mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.<sup>34</sup> Penelitian ini

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilakunya yang akan diamati, karena penelitian bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.<sup>35</sup>

Penelitian ini berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan objek yang diteliti. Memberikan deskripsi secara sistematis, valid, logis, objektif dan akurat mengenai analisis program keluarga harapan terhadap tingkat kesejahteraan penerima bantuan Kelurahan Lompoe Parepare.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada peserta PKH di Kelurahan Lompoe Parepare yang terletak di JL. Gelora Mandiri, Kelurahan Lompoe, Parepare. Peneliti memilih lokasi di Kelurahan Lompoe karena terdapat masalah pendistribusian PKH. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sebelumnya peneliti telah melakukan observasi awal kepada beberapa peserta PKH dan dari data awal tersebutlah peneliti tertarik dengan keluhan para peserta PKH yang dimana distribusi PKH tidak merata.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis adalah sekitar  $\pm$  2 bulan.

---

<sup>35</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka fokus penelitian ini untuk mengetahui Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Parepare (Perspektif Ekonomi Islam).

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi dan wawancara. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara pada peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Lompoe Parepare. Data penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para peserta program keluarga harapan di Kelurahan Lompoe Parepare.

#### **2. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

#### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan Langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono, metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian kualitatif adalah wawancara, kuesioner,

dan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu observasi wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah peninjauan, pengamatan; peninjauan secara cermat.<sup>36</sup> Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati permasalahan yang ada ditengah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait judul yang diangkat oleh penulis. Observasi telah dilakukan oleh penulis di Kelurahan Lompoe Parepare, dimana penulis sudah mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan pendistribusian pada masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung.<sup>37</sup> Pada penelitian ini, yang menjadi informan adalah peserta PKH, pendamping PKH dan Kordinator PKH di Dinas

---

<sup>36</sup> H.S. Kartoredjo. “*Kamus Baru Kontemporer*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. 2014), h. 258.

<sup>37</sup> A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*” (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 372.

Sosial. Pada pengumpulan data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para informan tersebut dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Penelusuran referensi (*reference exploring*) yaitu metode pengumpulan data dimana penulis menelusuri dan mempelajari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dengan penelusuran referensi ini sangat diperlukan dalam menemukan data dari berbagai referensi yang ada untuk dijadikan data tambahan dalam memperkuat data dan hasil yang bersumber dari penelitian.<sup>38</sup> Penulis mengumpulkan data-data berupa referensi yang bersumber dari penelitian dan data para Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lompoe, Parepare.

## 2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan diolah melalui 4 (empat) tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap informan yang berhubungan langsung dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 240.

<sup>39</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang di dapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>40</sup> Hal ini dilakukan agar data ditelaah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>41</sup> Pada penelitian ini data yang diperoleh dari informan di verifikasi guna memperoleh data yang valid yang berhubungan langsung Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lompoe Parepare.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah *concluding*, yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, *verifying* *analyzing*.

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

<sup>41</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian*, (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada obek penelitian sehingga keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* dan Kepastian/dapat dikonfirmasi (*Confirmability*).<sup>42</sup>

### 1. Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan kriteria derajat kredibilitas pada dasarnya validitas internal pada penelitian kualitatif. Kriteria ini berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang sah penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, analisis kasus negative, teknik triangulasi menggunakan bahan referensi dan menggunakan *Member Check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

### 2. Kepastian/dapat dikonfirmasi (*Confirmability*)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektif penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Uji kepastian dapat diperoleh dengan cara mencari persetujuan

---

<sup>42</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, IAIN PAREPARE, 2020, h. 24.

beberapa orang termasuk dosen pembimbing terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data yang diperlukan.<sup>43</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman terbagi atas tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu: (1) Reduksi data (*Data reduction*); (2) *Data Display* (*Display data*); dan (3) Penarikan Kesimpulan/verifikasi.<sup>44</sup>

#### a. Reduksi Data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tulis lapangan (*Written-up field notes*). Oleh karena itu data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan. Ini berarti pula reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data dilapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, pengkodean, membuat tema, membuat *cluster*, membuat pemisahan, dan menulis memo. Reduksi data dilanjutkan sesudah kerja lapangan, sampai laporan akhir penelitian lengkap dan selesai disusun.

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana yang akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (CV: Alfabeta, Bandung, 2009), h. 269-277.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244.

merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam suatu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. *Data Display*

*Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada waktu melakukan reduksi data pada hakikinya sudah penarikan kesimpulan, dan pada waktu penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang sudah direduksi dan juga dari *display* data. Kesimpulan bukan dibuat sekali jadi. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau mungkin juga mengecek dengan data lain, namun perlu diingat bahwa seandainya menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lompoe Parepare Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Wawancara dilakukan pada bapak Samsul selaku kordinator PKH Parepare mengenai awal mula pelaksanaan dan pendataan PKH hingga dilaksanakannya di Parepare sebagai berikut:

Jadi awal mula pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Parepare itu 2013 kalau secara umumnya itu 2007 secara nasional. Tapi di Sulawesi selatan pada saat itu baru 3 daerah Makassar, Takalar dan Bone. Pas PKH pertama kali masuk itu tidak semua menyuluruh dapat cuman Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Soreang, 2015 itu baru Kecamatan Ujung dapat. 2013 itu tidak mendata, datanya langsung masuk. Waktu pertama itu kita hanya langsung perpal, perpal itu data yang di kirim dari kementerian dari pusat itu kita datang betul tidak masih ada orangnya terus kemudian betul tidak masih pra sejahtera. Kita tidak mendata data awal bukan dari kita, kita hanya validasi perpal. Jadi sekarang itu pelaksanaan PKH dari kelurahan yang mengatur nah itu tugas dari pendamping PKH yang mendata nama-nama masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian akan dibahas di kelurahan. Musyawarah di Kelurahan nanti akan berunding siapa saja yang berhak dan nanti hasilnya itu langsung di kirim di pusat.<sup>45</sup>

Bapak samsul kembali menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan PKH sebagai berikut:

Terus calon penerima nanti dipanggil pada persiapan pertemuan awal dan validasi, terus ada data awal calon PKH

---

<sup>45</sup> Samsul, Kordinator PKH, *Wawancara* dilakukan di Dinas Sosial Kota Parepare, 11 Januari 2023.

selanjutnya pendampingan sosial PKH untuk persiapan pertemuan awal tadi, lalu pelaksanaan PA disitulah nanti ada sosialisasi, pelaksanaan validasi. Pada saat itu pendamping PKH menjelaskanlah apa itu PKH intinya berkaitan dengan PKH sampai menjelaskan syarat, sanksi, mekanisme, hak dan kewajiban, bagaimana penyalurannya, komitmen yang harus dijaga hingga sanksi. Jelasnya.<sup>46</sup>

Bapak Samsul mengemukakan bagaimana musyawarah yang dilakukan di Kelurahan setelah pendataan nama-nama calon penerima PKH sebagai berikut:

Nama-nama yang sudah didata setelah itu dibawa ke Kelurahan untuk dilakukan musyawarah siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan PKH tersebut. Setelah itu nanti akan dicocokkan terlebih dahulu data-datanya. “Terus calon penerima nanti dipanggil pada persiapan pertemuan awal dan validasi, terus ada data awal calon PKH selanjutnya pendampingan sosial PKH untuk persiapan pertemuan awal tadi, lalu pelaksanaan pendampingan awal disitulah nanti ada sosialisasi, pelaksanaan validasi. Pada saat itu pendamping PKH menjelaskanlah apa itu PKH intinya berkaitan dengan PKH sampai menjelaskan syarat, mekanisme, hak dan kewajiban, bagaimana penyalurannya, komitmen yang harus dijaga hingga sanksi. Jelasnya.”<sup>47</sup>

Bapak Samsul menjelaskan mengenai verifikasi berkas sebagai berikut:

Setelah musyawarah dilanjutkanlah verifikasi berkas yang ditangani langsung oleh Kelurahan, bukan lagi di Dinas Sosial. Jadi yang mengetahui banyak mengenai PKH dan segala macam itu yah di Kelurahan khususnya pendamping. Itu data-data warga langsung dikirim ke pusat bukan ke Dinas Sosial. Jadi tugas kita itu mengkorinir bagaimana jalannya PKH di

---

<sup>46</sup> Samsul, Kordinator PKH, *Wawancara* dilakukan di Dinas Sosial Kota Parepare, 11 Januari 2023.

<sup>47</sup> Samsul, Kordinator PKH, *Wawancara* dilakukan di Dinas Sosial Kota Parepare, 11 Januari 2023.

Parepare.<sup>48</sup>

Ibu Pipi selaku pendamping PKH di Kelurahan Lompoe menjelaskan komponen pada penerimaan PKH, sebagai berikut:

Komponen di PKH itu ada 3 komponen kesehatan, pendidikan dan kensos atau kesejahteraan sosial. Pada setiap komponen harus memenuhi krietria dalam proses verifikasi berkas.<sup>49</sup>

Adapun komponen-komponen yang perlu KPM penuhi sesuai kriteria dalam proses verifikasi, yaitu:

Kriteria pada penerima PKH komponen Kesehatan terbagi atas dua sebagai berikut:

a) Ibu Hamil/Nifas/Menyusui

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.<sup>50</sup>

Ibu Pipi selaku pendamping PKH menjelaskan komponen kesehatan sebagai berikut:

Komponen kesehatan itu ada ibu hamil dan anak balita. Nah kalau untuk ibu hamil itu harus melakukan hidup sehat dan melakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat, dan ini harus dilakukan secara rutin. Ibu hamil sekurang-kurangnya setiap tiga bulan sekali.<sup>51</sup>

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasannya penerima PKH

<sup>48</sup> Samsul, Kordinator PKH, *Wawancara* dilakukan di Dinas Sosial Kota Parepare, 11 Januari 2023.

<sup>49</sup> Pipi, Pendamping PKH Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan dilakukan secara *online*, 27 Januari 2023.

<sup>50</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Tahun 2021-2024, h. 22-23.

<sup>51</sup> Pipi, Pendamping PKH Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan dilakukan secara *online*, 27 Januari 2023.

khusus ibu hamil harus secara rutin melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan arahan dari pendamping. Fasilitas yang sudah tersedia secara gratis di puskesmas terdekat memberikan wadah pada ibu hamil tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan pemeriksaan secara rutin.

b) Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.<sup>52</sup>

Dijelaskan pula mengenai anak usia dini atau balita yang mendapatkan bantuan PKH, sebagai berikut:

Untuk anak balita dari umur 0 bulan sampai umur 6 tahun itu juga mendapatkan bantuan. Bagi ibu-ibu yang anaknya mendapatkan bantuan harus juga rutin bawah anaknya pergi ke posyandu setiap bulan itu wajib sampai umurnya 6 bulan. Sudah ada tim posyandu yang siap melayani para ibu-ibu dan anaknya.<sup>53</sup>

Seperti halnya yang dikemukakan oleh ibu Pipi selaku pendamping PKH pada penjelasan ibu hamil tadi, penerima PKH harus membawah anak balitanya untuk ke posyandu secara rutin setiap bulannya.

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seseorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTS sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Tahun 2021-2024, h. 23.

<sup>53</sup> Pipi, Pendamping PKH Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan dilakukan secara *online*, 27 Januari 2023.

<sup>54</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Tahun 2021-2024, h. 23.

Wawancara pada komponen kesehatan telah dijelaskan oleh ibu Pipi selaku pendamping PKH, selanjutnya beliau kembali menjelaskan komponen kedua yaitu komponen pendidikan, sebagai berikut:

Selanjutnya itu komponen pendidikan yah, jadi pada komponen pendidikan itu mulai dari umur 6 sampai 21 tahun, sampai tamat SMA. Jadi itu pas di dilihat pada saat mendata kartu keluarga mereka itu, misalnya anaknya ada tiga terus semuanya SD dalam satu kelompok komponen anak SD itu hanya satu yang berhak mendapatkan bantuan. Beda dengan misalnya anaknya tiga terus semuanya sekolah satu SD, satu SMP terus satunya SMA nah, itu baru bisa dapat ketiga-tiganya. Seperti yang saya bilang tadi itu, data mereka sudah ada di sekolah jadi langsung terinput kesekolah, intinya anak sekolah yang menerima PKH itu wajib belajar 12 tahun dengan kehadiran 85% tadi. Jika dikatakan akan terjadi kecurangan saya jamin tidak, karna langsung dari sekolah dan terbaca di pusat.<sup>55</sup>

Hasil wawancara pada ibu Pipi selaku pendamping PKH sejalan dengan teori pada bab 2 yang membahas mengenai kewajiban keluarga harapan penerima PKH pada komponen pendidikan yang dimana anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif.

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial terbagi atas dua sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Pipi, Pendamping PKH Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan dilakukan secara *online*, 27 Januari 2023.

a) Lanjuta Usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.<sup>56</sup>

Wawancara kembali dilakukan pada ibu Pipi selaku pendamping PKH menjelaskan mengenai komponen kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

Komponen terakhir itu kesos atau kesejahteraan sosial nah itu juga terbagi dua ada yang lanjut usia dan ada yang penyandang disabel. Untuk sekarang masyarakat yang lanjut usia dan berhak mendapatkan bantuan adalah orangtua yang umurnya 70 tahun lebih atau 70+ itu ketentuan sekarang. Jadi kita kemarin itu mendata ulang lagi karna jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan kriteria penerima, kan orangtua bias aitu bisa disebut lansia kalau umur 60an, sekarang sudah beda lagi, harus tercatat di KK nya umur 70 tahun ke atas. Jadi perumpaan dalam KK itu ada dua orangtua yang lanjut usia, tetap hanya satu yang bisa dapat bantuan dalam satu komponen.<sup>57</sup>

Ulasan dari ibu Pipi selaku pendamping PKH sejalan dengan teori pada bab 2 yang membahas mengenai kriteria penerima manfaat PKH dimana “Seseorang berusia lanjut mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga”. Penjelasan ibu Pipi memberikan kejelasan kembali bahwasannya pada satu komponen dalam satu keluarga hanya ada satu orang saja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut jika komponennya sama.

b) Penyandang Disabilitas Berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan

<sup>56</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Tahun 2021-2024, h. 23.

<sup>57</sup> Pipi, Pendamping PKH Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan dilakukan secara *online*, 27 Januari 2023.

kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.<sup>58</sup>

Wawancara kembali dilakukan oleh ibu Pipi pendamping PKH yang menjelaskan mengenai penyandang disabilitas berat, sebagai berikut:

Kalau penyandang disabel berat itu, sama halnya dengan yang lanjut usia tadi. Jadi kami mendata benar-benar yang hidupnya bergantung pada keluarga, seperti lumpuh, buta dan lain-lainnya. Tapi untuk kesejahteraan sosial itu untuk yang tunggal ditangani oleh rehabilitasi sosial kalau dalam masih bentuk keluarga itu di PKH. Tapi kalau ada pengurusnya yang ingin memasukkan ke PKH itu bisa, kita terima karna kita tidak melayani *person* tetapi keluarga.<sup>59</sup>

Hasil wawancara ibu Pipi selaku pendamping PKH sejalan dengan teori pada bab 2 yang membahas mengenai penerima manfaat PKH bahwasannya penerima bantuan disabilitas berat ditujukan kepada penyandang yang hidupnya bergantung pada keluarga dan tercatat pada Kartu Keluarga.

Hasil dari wawancara dilapangan pada kordinator PKH Kota Parepare dan Pendamping PKH kelurahan Lompoe Parepare, peneliti menjelaskan bahwasannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lompoe Parepare dalam mensejahterahkan masyarakatnya dilakukan secara terperinci dan sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai

---

<sup>58</sup> Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Tahun 2021-2024, h. 23.

<sup>59</sup> Pipi, Pendamping PKH Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan dilakukan secara *online*, 27 Januari 2023.

prosedur yang telah ditetapkan pada pemerintah pusat. Pendataannya pun dilakukan secara menyeluruh, seperti halnya pendataan bantuan PKH pada anak sekolah semua data dipegang langsung oleh pihak sekolah dan datanya langsung terinput ke pusat.

Ibu Pipi selaku pendamping PKH di Kelurahan Lompoe mengemukakan mengenai sosialisasi serta kendala yang dihadapi sekaligus pada saat pertemuan pertama kali dengan para penerima PKH pada saat itu sebagai berikut:

Alhamdulillah berbicara pada saat sosialisasi ataupun masalah kendala pada saat sosialisasi adalah pertama bahasa, dikarenakan saya Bugis Soppeng juga jadi mungkin kurang paham atau mengerti. Kedua ada beberapa warga yang bekerja jadi informasi yang sampai ke warga yang tidak sempat ikut terkadang berbeda.”<sup>60</sup>

Wawancara pada bapak Samsul juga menjelaskan dan menekankan penjelasan perihal bantuan PKH yang diterima para penerima PKH sebagai berikut:

Jadi begini yah, pada saat sosialisasi itu harus juga dijelaskan mengenai PKH ini terutama pendamping nantinya. Jadi PKH sebenarnya itu kan kita mau mensejahterahkan terus PKH juga itu bukan pemberantasan kemiskinan intinya bukan program pemberantasan kemiskinan tetapi program pemutus rantai kemiskinan. Jadi makanya yang kita mau itu anaknya tidak boleh ada yang miskin, yah makanya itu dulu yang kita bantu sejak janin kalau misalnya sudah hamil nah itu di bantu, lahir balita SD-SMA itu yang di bantu. Kenapa di bantu karna

---

<sup>60</sup> Pipi, Pendamping PKH Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan dilakukan secara *online*, 27 Januari 2023.

diharapkan agar dia memiliki SDM yang bagus, begitu juga dengan lansia yang di berikan bantuan. Jadi perlu ditekankan kepada penerima PKH kalau bantuan ini bukan pemberantasan kemiskinan tetapi pemutus rantai kemiskinan.<sup>61</sup>

Wawancara kembali dilakukan oleh kak Pipi mengenai pendampingan selama proses pelaksanaan PKH sebagai berikut:

Jadi saya sebagai pendamping PKH di Kelurahan Lompoe bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada penerima bantuan PKH mengenai apa sebenarnya itu PKH. Bagaimana sistem pelaksanaannya, sebagai penerima apa yang harus mereka lakukan dan pada saat sosialisasi saya sudah menjelaskan dan untuk lebih memperdalam akan ada pembentukan kelompok yang dimana pertemuannya akan diadakan setiap bulan dengan materi yang berbeda-beda seputaran PKH pastinya.<sup>62</sup>

Wawancara pada pendamping PKH kembali dilakukan dengan pembahasan komitmen pada penerima PKH sebagai berikut:

Komitmen yang dimaksud disini adalah bagaimana mereka atau para penerima PKH benar-benar menjalankan kewajiban mereka selaku penerima PKH. seperti halnya ibu hamil, yah harus memeriksa kandungannya setiap tiga kali sebulan kalau tidak, akan mendapatkan teguran lisan sebagai peringatan awal. Anak sekolah pun seperti itu, kalau absensinya kurang dari 85% kehadiran maka apabila kejadian tersebut masih terulang selama 3 bulan maka bantuan atau komponen yang diterima akan dicabut. Karna data anak sekolah itu yang input adalah dari pihak sekolah jadi langsung terbaca di pusat.<sup>63</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Samsul mengenai komitmen penerimaan PKH sebagai berikut:

<sup>61</sup> Samsul, Kordinator PKH Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan di Dinas Sosial Kota Parepare, 11 Januari 2023.

<sup>62</sup> Pipi, Pendamping PKH Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan dilakukan secara *online*, 27 Januari 2023.

<sup>63</sup> Pipi, Pendamping PKH Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan dilakukan secara *online*, 27 Januari 2023.

Jadi kehadiran anak sekolah itu harus 85% dibawah itu harus di tindak lanjuti karna data mereka itu terinput dari sekolah langsung ke pusat. Semuanya itu langsung konek di pusat. Jadi misalnya kalau anaknya sudah tidak sekolah walaupun orang tuanya bilang anaknya masih sekolah tapi kalau data dari sekolah tidak konek dipusat itu tetap terputus. Kalau misalnya balita satu kali saja tidak memeriksakan kesehatannya satu bulan dulu di pending tiga bulan berturut-turut tidak memeriksakan kesehatannya dicabut, ternyata dia tidak komitmen pada aturan.<sup>64</sup>

Hasil wawancara dari kedua informan bapak Samsul selaku kordinator PKH Kota Parepare dan Ibu Pipi selaku pendamping PKH di Kelurahan Lompoe diatas dapat disimpulkan bahwasannya Penerima Keluarga Manfaat (PKM) pada PKH harus menaati peraturan yang telah disepakati sedari awal sesuai komitmen sebelum penerimaan PKH tersebut dikarenakan penerima PKH terikat pada aturan sesuai yang berlaku.

Wawancara pada bapak Samsul menegaskan mengenai PKH, sebagai berikut:

PKH itu bantuan tunai bersyarat tidak sama dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), tidak sama dengan BPNT itukan di berikan yang tidak ada syaratnya, nah kalau PKH ada syaratnya komitmennya itu harus rajin sekolah harus rajin memeriksakan kesehatan harus rajin ikut P2K2 (Pertemuan Penguatan Kapasitas Keluarga) ini berlaku untuk semua komponen di PKH.<sup>65</sup>

Wawancara pada kak Pipi mengenai pencairan dana PKH sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Samsul, Kordinator PKH, *Wawancara* dilakukan di Dinas Sosial Kota Parepare, 11 Januari 2023.

<sup>65</sup> Samsul, Kordinator PKH, *Wawancara* dilakukan di Dinas Sosial Kota Parepare, 11 Januari 2023.

Pada saat pencairan dana itu dilakukan di kantor pos, jadi ada blanko yang akan diberikan kepada penerima PKH di Kelurahan, nah disitu tertera ada nama, dan jumlah nominal yang diterima selama per triwulannya. Jadi yang menerima itu harus dari salah satu anggota keluarga yang tercantum di KK masing-masing diluar dari itu tidak bisa atau harus bersangkutan.<sup>66</sup>

## **2. Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Parepare**

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat dan pengalihan hak milik.<sup>67</sup> Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan semua akan dipertanggungjawabkan dikahirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidak seimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial.<sup>68</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, distribusi adalah suatu proses penyaluran barang dan jasa dari produksi untuk sampai kepadatangan konsumen sesuai dengan tujuan atau sasaran (tepat).

---

<sup>66</sup> Pipi, Pendamping PKH Kota Parepare, *Wawancara* dilakukan dilakukan secara *online*, 27 Januari 2023.

<sup>67</sup> M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 129.

<sup>68</sup> M. A Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Intermasa: Jakarta, 1992), h. 114.

Distribusi penerima PKH di Kelurahan Lompoe berjumlah  $\pm$  200 orang dan setiap tahap pencairan bantuan tidak semua dari nama yang telah di data tersebut menerima setiap tahapnya melainkan penerimaannya bergilir dan itu telah di tentukan oleh pusat. Penerimaan bantuan PKH dalam satu tahun sebanyak 4 tahap dan pencairannya setiap per triwulan. Pencarian dana PKH terkadang tidak tepat waktu dari pusat.

Hasil penelitian dilapangan tidak relevan dengan teori pada bab 2 mengenai mekanisme penyaluran PKH. Dimana dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Samsul selaku kordinator PKH Parepare sebagai berikut:

Pada tahap pendistribusian itu kembali lagi dipelaksanaan PKH dimana melakukan pendataan, pencocokan data, dilihat apakah datanya sudah valid apa belum, melakukan musyawarah, verifikasi, sosialisasi dan sebagainya. Harus sesuai prosedurlah. Dari pihak kelurahan yang menginput data warganya, kemudian ada pendampingan PKH oleh pendamping PKH. Dana PKH cair itu per triwulan berupa uang tunai dan tahapan pencairannya sampai tahap IV. Seperti terakhir ini dilaksanakan tanggal 12-27 Desember.”<sup>69</sup>

Wawancara kembali dilakukan pada bapak Samsul mengenai jumlah penerima PKH dan pernyataan mengenai data yang dari pusat dimana nama dalam data tersebut tidak menerima PKH setiap pencairannya (bergilir) dan pencairan dananya tidak tepat waktu, sebagai berikut:

Jumlah yang menerima PKH itu yah kurang lebih 200san dan setiap tahunnya itu 4 kali pencairan dana tapi pada tahun 2022 kemarin pencairan dana PKH itu terlambat jadi pencairannya itu seharusnya pada bulan November 2022 tetapi karna dana dari pusat baru cair bulan Desember jadi baru disalurkan ke masyarakat yang menerima PKH,

---

<sup>69</sup> Samsul, Kordinator PKH, *Wawancara* dilakukan di Dinas Sosial Kota Parepare, 11 Januari 2023.

penyalurannya itu dari tanggal 12-27 Desember. Penerima PKH juga bukan jumlah yang sedikit, itu adalah jumlah yang banyak.<sup>70</sup>

Hasil dari wawancara ini kembali menunjukkan hasil awal observasi peneliti pada penerima PKH bahwasannya kerap kali terjadi keterlambatan pendistribusian bantuan. Hal ini dikarenakan penerima PKH tersebut jumlahnya besar.

Tabel 4.1 Skema Bantuan Per Tahap Penyaluran

No.	Kategori	Indeks/Tahun (Rp)	Indeks/Per 3 Bulan (Rp)
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2.	Anak Usia Dini	3.000.000	750.000
3.	Anak Sekolah SD	900.000	225.000
4.	Anak Sekolah SMP	1.500.000	375.000
5.	Anak Sekolah SMA	2.000.000	500.000
6.	Lanjut Usia 70+	2.400.000	600.000
7.	Disabilitas Berat	2.400.000	600.000

*Sumber Data Dari Dinas Sosial*

Tabel 4.2 Data Penerima PKH di Kelurahan Lompoe Parepare

<sup>70</sup> Samsul, Kordinator PKH, *Wawancara* dilakukan di Dinas Sosial Kota Parepare, 11 Januari 2023.

<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Umur</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Alamat</b>	<b>Komponen</b>
I Cawi	P	50	IRT	J. Liu Buloe Wekke'e	Pendidikan
Rika	P	40	IRT	J. Liu Buloe Wekke'e	Pendidikan
Karisma	P	29	IRT	J. Liu Buloe Wekke'e	Pendidikan
Santi	P	39	IRT	J. Liu Buloe Wekke'e	Pendidikan
Salma Dg. Baji	P	35	IRT	Wekke'e	Pendidikan
I reja	P	81	Penjual arang	J. Lasangga Rt 02rw 02	Lanjut Usia
Masna	P	70	Penjual Bolu Cukke	J. Lammide	Lanjut Usia
I Kina	P	70	Penjual Buras	J. Gelora Mandiri Lamaubeng Rw 008/Rt 002	Lanjut Usia

I Pessa	P	73	-	J. Gelora Mandiri Lamaubeng Rw 008/Rt 002	Lanjut Usia
Nursia	P	45	-	J. Gelora Mandiri Lamaubeng Rw 008/Rt 002	Disabilitas Berat

*Sumber Data Hasil Wawancara*

Uraian lebih jelas mengenai distribusi penerima PKH di Kelurahan Lompoe, dimana penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa informan sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan yang telah diberikan kepada informan ibu I Cawi, 50 tahun selaku ibu rumah tangga penerima PKH, sebagai berikut:

Saya menerima PKH sudah lama nak mau 10 tahun, tapi kalau dalam bentuk uang baru dua kali saya terima nak karna dulu itu sembako. Pencairannya juga tidak lancar saya terima nak biasa menunggak. Alhamdulillah saya dapat bantuan nak ada uang penambah sekolahnya anak-anak dan juga keperluan sekolahnya bisa di beli. Kemarin anak saya yang pergi sendiri ambil uang PKH di kantor pos nak.<sup>71</sup>

Wawancara selanjutnya pada ibu Rika, 40 tahun selaku ibu rumah tangga penerima PKH, sebagai berikut:

Sudah sekitar 7 tahun nak saya terima PKH, per triwulan kan pencairannya dan alhamdulillah lancar saya terima nak. Itu yang di syukuri yah nak ada penambah uang kebutuhan anak-anak untuk sekolah ditambah penghasilan suami alhamdulillah di syukuri nak.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> I Cawi, Penerima PKH, *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Lompoe, 19 Januari 2023.

<sup>72</sup> Rika, Penerima PKH, *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Lompoe, 19 Januari 2023.

Berbeda pendapat dengan informan selanjutnya, wawancara pada ibu Karisma, 29 tahun selaku ibu rumah tangga penerima PKH yang memiliki empat anak satu usia dini (anak balita) dan tiganya bersekolah di bangku SD mengeluhkan mengenai nama anaknya belum terdaftar pada PKH dan hanya salah satu saja anaknya yang SD menerima bantuan dan tidak menerima dana bantuan beberapa kali, sebagai berikut:

Sudah lama bantuan PKH keluar dan saya baru dua kali terima saya tidak tahu itu kenapa, sebelum ada anak kecil saya hingga setelah anak saya lahir baru ada saya terima dan baru itupun baru dua kali saya terima. Hanya satu anak saya yang menerima bantuan sedangkan anak saya ada empat. Itu yang buat saya heran kan atau mungkin karna saya penerima PKH baru. Saya menjadi peserta PKH sudah 2 tahun tetapi baru 2 kali saya dapat. Tapi itu di syukuri dek siapa yang mau berikan uang dengan nominal lumayan untuk kebutuhan anak sekolah, mau di bilang tidak cukup yah di cukup-cukupi.<sup>73</sup>

Hasil wawancara dari ibu Karisma mengemukakan bahwa adanya keterlambatan pendistribusian pada PKH yang diterima sedangkan ibu Karisma telah menjadi peserta penerima PKH selama 2 tahun namun baru mendapatkan dua kali pencairan dana. Setelah dikonfirmasi pada kordinator PKH, bapak Samsul mengatakan, sebagai berikut:

Banyak terjadi seperti itu dek, dikarenakan terkadang data penduduk tidak terkoneksi atau bermasalah. Kalau terjadi seperti itu harus segera mengurus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>74</sup>

Hasil dari wawancara pada bapak Samsul selaku kordinator PKH menjelaskan kejadian yang dialami ibu Karisma kerap terjadi dan harus segera ditangani. Kurangnya informasi yang didapatkan ibu Karisma menyebabkan

---

<sup>73</sup> Karisma, Penerima PKH, *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Lompoe, 19 Januari 2023.

<sup>74</sup> Samsul, Kordinator PKH, *Wawancara* dilakukan di Dinas Sosial Kota Parepare, 11 Januari 2023.

beliau baru dua kali mendapatkan pencairan dana padahal beliau sudah terdaftar selama dua tahun menjadi penerima PKH.

Wawancara kembali dilanjutkan pada informan ibu Santi, 39 tahun selaku ibu rumah tangga penerima PKH, sebagai berikut:

Mungkin saya sudah terima PKH itu dek sejak anakku kelas 1 SD sudah 9 tahun yah dek. Ini pencairan PKH tidak tepat waktu, kan kemarin itu telat dek harusnya bulan November tapi di bulan Desember keluar. Biasanya itu awal tahun kaya sekarang awal bulan itu keluar tapi saya tunggu-tunggu belum ada dek. Saya itu bersyukur kalau dananya sudah cair saya bilang ke anak saya “alhamdulillah nak uang sekolah kamu sudah cair pembeli kuota kamu sudah ada”. Terkadang penghasilan suami saya dek tidak menentu saya biasa pusing berfikir untuk makanan sehari-hari bagaimana terkadang suami saya pergi tarik ojek. Saya bersyukur masih dapat bantuan PKH. Sekarang itu kalau mau ambil uang ke kantor pos dek, jadi nanti ada kertas diambil di kantor Lurah dek.<sup>75</sup>

Hasil wawancara pada ibu Santi merupakan definisi dari kata bersyukur dengan kehidupan yang berkecukupan. Dana bantuan PKH yang beliau terima sangat membantu dalam pendidikan anaknya yang kini sedang menempuh bangku SMP. Kebutuhan anak sekolah yang semakin banyak membuat ibu Santi bersyukur dengan adanya bantuan PKH menutupi sebahagian kekurangan ekonomi keluarganya.

Wawancara selanjutnya yaitu ibu Salma Dg Baji, 35 tahun merupakan salah satu penerima bantuan PKH pada komponen pendidikan yang bekerja sebagai wirausaha bersama suaminya dengan berjualan bakso, sebagai berikut:

Saya terima PKH dek sekitaran 4 tahun, alhamdulillah saya terima tepat waktu dek karna yang diterima itu per tiga bulan yang baru-baru saya

---

<sup>75</sup> Santi, Penerima PKH, *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Lompoe, 19 Januari 2023.

terima itu uang dek tahap IV kemarin bulan Desember. Saya merasa alhamdulillah ada penambahan uang saku sekolah anak.<sup>76</sup>

Penelitian kembali dilakukan pada hari selanjutnya. Pada penelitian ini informan yang akan di teliti penerima PKH yang lanjut usia dan disabilitas berat. Informan pertama yaitu ibu I Reja, 81 tahun yang bekerja sebagai penjual arang, sebagai berikut:

Saya sudah lama nak dapat bantuan dari awal itu tahun 2013 tapi kalau ada pertemuan sudah tidak ikut sekarang maklum umur sudah tua nak tidka bisa lagi jalan. Alhamdulillah setiap tiga bulan itu dapat uang dapat juga sembako. Kalau uangnya kadang lama diterima kadang cepat yang penting bersyukur ada orang yang berikan uang 600 ribu nak apa lagi tinggal sendiri.<sup>77</sup>

Wawancara berikutnya yaitu ibu Masna, 70 tahun penerima PKH yang bekerja sebagai penjual bolu cukke, sebagai berikut:

Saya baru 2021 terima ini bantuan nak, saya yang sudah nenek-nenek ini untuk tambah penghasilan menjual kue bolu cukke nak. Alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah bersyukur nak. Uang kemarin cair alhamdulillah tepat waktu.<sup>78</sup>

Wawancara selanjutnya jawabannya hampir sama dengan kedua informan diatas, ibu I Kina, 70 tahun penerima PKH yang bekerja sebagai penjual buras, sebagai berikut:

Saya baru-baru dapat nak 2021 kemarin. Sebelum dapat bantuan hasil dari jualan buras tambah-tambah penghasilan nak. Di syukuri nak kalau sudah tua begini yang di kerja seperti jual-jualan saja yang cocok untuk se usia kami. Kalau pencairannya kadang cepat kadang lambat yang penting di dapat nak.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Salma Dg. Baji, Penerima PKH, *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Lompoe, 19 Januari 2023.

<sup>77</sup> I Reja, Penerima PKH, *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Lompoe, 20 Januari 2023.

<sup>78</sup> Masna, Penerima PKH, *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Lompoe, 20 Januari 2023.

<sup>79</sup> I Kina , Penerima PKH, *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Lompoe, 20 Januari 2023.

Wawancara selanjutnya yaitu ibu I Pessa, 73 tahun dan anaknya yang penyandang disabilitas berat Nursia, 45 tahun, sebagai berikut:

Saya dengan anakku terima dua-dua nak, dari 2013 itu kalau tidak salah saya terima nak dengan anakku. Begini kondisi tidak ada pekerjaan rawat anak juga. Kalau saya rasa alhamdulillah lancar nak, saya bersyukur bisa dapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau dibilang sejahtera nak alhamdulillah bisa dibilang seperti itu apa lagi saya sudah lama menerima, kalau orangtua yah alhamdulillah dicukupi nak.<sup>80</sup>

Hasil wawancara dari 5 informan pada hari kedua penelitian, jawaban merekapun hampir semua sama dengan rasa bersyukur bisa menutupi kekurangan ekonomi keluarga walaupun terkadang pencairan dana tidak tepat waktu tetapi kebanyakan dari mereka merasakan tepat pada waktunya. Hal ini peneliti telah menjelaskan dikarenakan KPM yang menerima PKH tersebut jumlahnya besar jadi proses pencairannya terkadang terlambat.

### **3. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Parepare**

Pendistribusian bantuan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat dari segi pencapaian tujuan yang sebenarnya adalah bertujuan untuk sosial dalam ekonomi Islam yaitu memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang sesama individu masyarakat, mengikis sebba-sebab adanya kebencian dalam masyarakat

---

<sup>80</sup> I Pessa dan Nursia, Penerima PKH, *Wawancara* dilakukan di Kelurahan Lompoe, 20 Januari 2023.

sehingga keamanan dan ketentraman di masyarakat dapat direalisasikan. Penyebab distribusi kekayaan tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas serta mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan dari teori prinsip pada distribusi dalam Islam ini sejalan dengan yang didapatkan oleh peneliti. berikut prinsip-prinsip distribusi dalam Islam, diantaranya:

**a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan**

Pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Kelurahan Lompoe Parepare telah mencapai keadilan namun belum mencapai pemerataannya. Sebagaimana peneliti telah meneliti beberapa informan bahwasannya ada seorang ibu yang mempunyai anak balita namun belum mendapatkan bantuan PKH. Jika dilihat dari kehidupan yang berkecukupan iforman tersebut telah memenuhi kriteria pada penerimaan PKH, permasalahan ini dapat mengakibatkan ketidakadilan pada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH.

**b. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang**

Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) pada Islam memberikan sebuah gambaran bahwasannya solidaritas pada individu dan sosial pada masyarakat Islam yang tercermin adalah pola hubungan antar sesama umat muslim. Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lompoe Parepare dari program pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian pada masyarakat. Dapat dilihat adanya suatu bentuk kepedulian antar sesama muslim dibuktikan dengan adanya bantuan

yang disalurkan kepada masyarakat yang benar membutuhkan. Penanaman rasa persaudaraan yang tinggi haruslah dijunjung tinggi dalam diri umat Islam sehingga tidak terjadi pecah belah karena kepentingan duniawi.

### **c. Prinsip Solidaritas Sosial**

Distribusi mempunyai tujuan yang penting untuk memenuhi kebutuhan suatu individu atau kelompok yang membutuhkan dalam menjalankan prinsip solidaritas di masyarakat muslim. Pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lompoe Parepare belum terlaksana sesuai dengan ketentuan prosedur yang menyebabkan tidak tercapainya prinsip solidaritas. Pada prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengartikan bahwa anjuran pada distribusi haruslah dengan do'a untuk tercapainya ketentraman batin dan kestabilan perekonomian masyarakat. Timbulnya suatu permasalahan dengan adanya ketidakadilan yang belum diperoleh akan mengakibatkan timbul rasa kecemburuan sosial antar masyarakat, dimana pada permasalahan ini akan tampak ketidaknyamanan dan ketidaktenangan dan hal itu menyebabkan belum tercapainya salah satu prinsip solidaritas dalam distribusi Islam.

## **B. Pembahasan dan Hasil**

### **1) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lompoe Parepare Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program dari pemerintah yang memberikan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pada pendidikan, kesehatan dan

kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari salah satu program-program dari pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan.

Program keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lompoe sudah ada pada tahun 2013. Pihak kelurahan telah mendata nama-nama masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut dan selanjutnya diberikan kepada Dinas Sosial yang akan menangani data tersebut atau Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan (UPPKH). PKH di Kota Parepare sudah lama keberadaannya tetapi tidak semua Kecamatan menyeluruh mendapatkan PKH tersebut dan data yang diterima Dinas Sosial adalah data perpal langsung yang di kirim dari kementerian pusat dan pihak Dinas Sosial mendatangi satu persatu kemudian memvalidasi data tersebut. Pelaksanaan PKH di Kelurahan pada saat ini melakukan pendataan ulang untuk masyarakat yang masih kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan PKH setelah itu akan dilakukan musyawarah di Kelurahan untuk menyeleksi nama-nama yang akan di kirim di pusat. ada dan dilakukan secara bertahap kepada calon penerima bantuan sebelum menerima dan menjadi peserta PKH.

Pelaksanaan PKH merupakan penyerahan dana bantuan yang dilakukan oleh para pendamping PKH. pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program ditingkat Kabupaten/Kota. Tugas pendamping termasuk didalamnya untuk melakukan sosialisasi, pengawasan dan mendampingi para peserta penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi komitmennya. Penerimaan PKH juga harus sesuai dengan kriteria komponen yang telah ditetapkan pada Kementerian Sosial RI didalam

bukunya Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024.

## 2) Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Parepare

### Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut.<sup>81</sup>

- a) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial
- b) Sosialisasi dan Edukasi
- c) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM
- d) Proses Penyaluran Bantuan Sosial KPM
- e) Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH
- f) Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Bantuan Sosial PKH
- g) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Teori pada bab 2 yang membahas mengenai mekanisme pada penyaluran Program Keluarga Harapan tidak sejalan dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti. Hasil dilapangan yaitu pada mekanismen penyaluran PKH adalah dengan melakukan pendataan pada masyarakat atau pendekatan dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk diketahui apakah layak atau tidaknya penerima bantuan PKH yang dilakukan oleh pendamping PKH. Setelah itu hasil yang didapat peneliti setelah selesai melakukan pendataan nama-nama tersebut dibawah ke Kelurahan dan di rundingngkan

---

<sup>81</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jamina Sosial, Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*, h. 29-30.

secara bersama-sama dengan pihak kelurahan atau di musyawarahkan nama-nama yang akan di data dan di verifikasi kemudian di kirim ke pusat. Cara pencairan dana pada PKH dengan mengambil blanko berisi nama dan nominal pada komponen yang diterima penerima PKH di Kelurahan kemudian di cairkan di kantor pos terdekat dengan memperlihatkan blanko tadi.

Keterlambatan pada pencairan dana PKH kerap terjadi, hal ini tidak berhubungan dengan pihak Kelurahan atau Dinas Sosial, melainkan langsung dari pusat. Seperti yang terjadi pada bulan Desember 2022 kemarin yang seharusnya cair pada bulan November 2022.

Hasil wawancara dari 10 informan mengenai Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Lompoe Parepare, peneliti menjelaskan bahwasannya pendistribusian di Kelurahan Lompoe dapat dikatakan pendistribusiannya belum menyeluruh tetapi sudah tepat pada sasaran. Dapat dilihat dari hasil wawancara ibu Karisma yang mempunyai anak balita yang belum mendapatkan atau terdaftar sebagai penerima PKH, sedangkan anak ibu Karisma sudah sesuai dengan kriteria penerima komponen pada anak usia dini atau anak balita juga dapat dilihat dari segi perekonomiannya. Sejumlah informan yang peneliti datangi tempat tinggalnya sudah dapat di lihat dari kondisi yang dialami oleh beberapa informan. Bahkan ada yang tinggal satu rumah dengan keluarganya dengan membangun tempat tinggal dibawah rumah untuk ditempati beristirahat dengan keluarga kecilnya.

Hasil dari penelitian ini belum sesuai dengan harapan penulis, pendataan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan atau pendamping PKH di Kelurahan Lompoe Parepare belum secara merata dalam mendata warga-warganya. Sistem

pendekatan kepada beberapa pihak dalam (aparatur) bisa saja terjadi pada bantuan penerima PKH.

### **3) Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Lompoe Parepare Perspektif Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil penelitian perspektif ekonomi Islam mengenai distribusi PKH di Kelurahan Lompoe Parepare dimana dapat dilihat dari prinsip-prinsip distribusi Islam, diantaranya:

- a) Prinsip Keadilan dan Pemerataan
- b) Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang, dan
- c) Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Ketiga prinsip distribusi Islam diatas hanya dua prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip pemerataan dan prinsip solidaritas. Dimana dapat dilihat dari pembahasan diatas bahwasannya salah satu informan penerima PKH ibu Karisma mempunyai anak balita yang telah termasuk dalam kriteria penerima bantuan PKH tetapi sampai saat ini belum mendapatkan atau terdata sebagai penerima PKH.

Hasil dari penelitian dengan teori pada bab 2 berdasarkan teori perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr berpendapat bahwa negara adalah *icon* utama dan memiliki peran yang sangat penting yaitu dengan menciptakan dan menjaga keadilan sosial. Dalam hal ini, negara harus menetapkan standar hidup yang dimana bisa dijadikan sebuah acuan untuk menciptakan keadilan sosial yang merata. Muhammad Baqir Al-Sadr juga berpendapat bahwa, pemerintah memainkan peran yang penting dan dinamis dalam melakukan implementasi

melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menghadapi tantangan pada era modern saat ini. Islam memberikan solusi mengenai masalah tersebut dengan cara pemerintah dapat menyediakan sistem jaminan sosial.<sup>82</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas hasil penelitian penulis dengan teori Muhammad Baqir Al-Sadr *valid*, dimana negara harus menciptakan keadilan sosial secara merata pada masyarakat. Seperti halnya Program Keluarga Harapan yang merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dimana pendistribusian harus dilakukan secara merata sesuai dengan kriteria komponen yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan pendapat Muhammad Baqir Al-Sadr bahwasannya masalah ekonomi muncul akibat adanya distribusi yang tidak adil dan tidak merata. Distribusi tersebut terjadi akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Pihak yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya, sehingga pihak yang kuat akan menjadi semakin kaya. Sedangkan, pihak yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya, sehingga pihak yang lemah menjadi semakin miskin. Hal tersebut yang menjadi latar belakang munculnya masalah ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahakan manusia yang tidak terbatas dan rasa ketidakpuasan yang tidak pernah habis.

Berdasarkan pendapat diatas hasil penelitian penulis dengan teori Muhammad Baqir Al-Sadr sejalan dengan hasil yang didapatkan oleh penulis. Permasalahan ekonomi muncul dikarenakan adanya distribusi yang tidak adil dan tidak merata pada

---

<sup>82</sup> Novie Andriani Zakariya, Jurnal : *Distribusi Perspektif Muhammad Baqir Al-Sadr*, (Januari 2020), h. 26-27.

masyarakat. Ketidak meratanya distribusi pada masyarakat dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan tentunya terjadi ketidak nyamanan sesama umat muslim. Segala sesuatu telah diukur dengan sempurna dan Allah swt. sebenarnya telah memberikan sumber daya yang cukup pada manusia di dunia, tetapi dalam hal ini kembali lagi pada manusianya bagaimana cara mereka mengelola, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang telah disediakan oleh Allah swt. di dunia.

Hakikatnya orang yang telah dipercayai untuk mengelola pendistribusian PKH ke masyarakat tidak mengoptimalkan dengan baik bantuan itu. Pemerataan bantuan belum secara menyeluruh didapatkan masyarakat sedangkan Islam telah memberikan tuntunan kepada para pelaku ekonomi, baik Pemerintah, pengelola atau pun masyarakat berkenan dengan kegiatan distribusi. Membagikan bantuan kepada orang yang membutuhkan adalah sesuatu hal yang terpuji dan di distribusi dalam perspektif Islam adalah suatu kegiatan yang boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan dari *nash* Al-Qur'an. Selain itu, dalam *fiqh al-mu'amalah* juga menetapkan bahwa segala transaksi mengenai kegiatan distribusi boleh dilakukan dengan cara apapun berdasarkan kebiasaan yang baik dan benar (*'urf shahih*) yang sedang berjalan ditengah kehidupan manusia.<sup>83</sup>

Dapat disimpulkan bahwasannya segala sesuatu hal yang telah diamanahkan untuk disalurkan atau disampaikan kepada seseorang hendaknya diberikan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam Islam pun menganjurkan kepada sesama umat muslim baik itu Pemerintah atau pun masyarakat untuk membagikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, seperti halnya Program Keluarga Harapan ini yang

---

<sup>83</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, H. A, "*Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 32.

merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah untuk di distribusikan kepada masyarakat yang mempunyai kriteria penerimaan bantuan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare dalam mensejahterahkan masyarakatnya telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai prosedur yang telah ditetapkan pada pemerintah pusat. Pendataannya pun dilakukan secara menyeluruh, seperti halnya pendataan bantuan PKH pada anak sekolah semua data dipegang langsung oleh pihak sekolah dan datanya langsung terinput kepusat.
2. Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare, peneliti menjelaskan bahwasannya pendistribusian di Kelurahan Lompoe sudah dapat dikatakan pendistribusiannya belum menyeluruh tetapi sudah tepat pada sasarannya. Sejumlah informan yang peneliti datangi tempat tinggalnya sudah dapat di lihat dari kondisi yang dialami oleh beberapa informan. Bahkan ada yang tinggal satu rumah dengan keluarganya dengan membangun tempat tinggal dibawah rumah untuk ditempati beristirahat dengan keluarga kecilnya.
3. Pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare berdasarkan perspektif ekonomi Islam belum sesuai dengan distribusi dalam Islam karena belum memenuhi dua prinsip dalam distribusi Islam yaitu prinsip pemerataan dan solidaritas. Ketidakadilan dan solidaritas yang belum tercapai dan mengakibatkan ada rasa kecemburuan sosial antar masyarakat dimana hal ini

menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidak tenangan yang menyebabkan belum tercapainya prinsip solidaritas dalam distribusi Islam.

## **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah hendaknya selalu melihat dan meninjau kondisi masyarakat secara langsung untuk memberikan bantuan yang tepat bagi warganya.
2. Untuk bagi masyarakat, perlu diperdayakan lagi melalui pengetahuan keterampilan, agar mempunyai penghasilan lain sehingga mampu memenuhi kebutuhan bagi keluarga. Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan hendaknya tidak berkecil hati apabila tidak memenuhi kriteria penerima manfaat PKH.
3. Untuk pendamping lebih diperhatikan lebih teliti apakah usulan dari data yang didapat atau yang di data Kementerian Sosial untuk calon KPM PKH sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Karna dilihat dari penelitian lapangan masih ada masyarakat yang seharusnya menerima pada satu komponen tapi tidak diperhatikan lebih lanjut.
4. Untuk penulisan selanjutnya, disarankan mencari teori-teori yang mendukung dan lebih kuat dalam menunjang permasalahan yang diambil.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim.*

### Buku

- Abbas, Anwar. 2008. *"Bung Hatta dan Ekonomi Islam"*. (Jakarta: Kompas Gramedia).
- Ahwal Kusuma, Nana Saudjana. 2002. *Proposal Penelitian*. (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo).
- Sadr, Muhammad Baqir Al. 1983 M/ 1403 H. *"Iqtishaduna (Our Economics) Discovery Attempt On Economic Doctrine In Islam"*. (Teheran: WOFIS).
- Amalia, Euis. 2009. *"Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam"*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Sadr, Muh. Baqir Al. 2008. *"Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna"*. (Jakarta: Zahra publishing house).
- Baqir Al-Hasani and Abbas Mirakhor. 1998/1440. *"Essay On Iqtishaduna The Islamic Approach To Economic Problems"*. (Silver Spring USA: NUR).
- BKKBN. 2017. *Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran*. (Jakarta).
- Cholid Narkubo, Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Djazuli, A. dan Yadi Janwari, H. A. 2002. *"Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan"*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Fuad, M. *et al.*, eds. 2006. *"Pengantar Bisnis"*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Karim, Adiwarmarman A. 2012. *"Ekonomi Mikro Islam"*. (Jakarta PT Raja Grafindo Persada).

- Kartoredjo, H.S. 2014. *“Kamus Baru Kontemporer”*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset).
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia). Sodiq, Amirus. 2015. *“Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”*. (Jurnal EQUILIBIRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember).
- Kementerian Sosial RI, Ditektorat Jaminan Sosial Keluarga. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*.
- Khomsan, Ali. 2015. *“Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin”*. (Jakarta : Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Moleong, Lexy J. 2007. *“Metode Penelitian Kualitatif”* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Muhadjirin, Noeng. 1996. *“Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama”*. (Yogyakarta: Rake Seraju).
- Mannan. M. A, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Intermasa: Jakarta, 1992).
- Penyusun, Tim. 2020. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. (IAIN PAREPARE).
- Poerwadarminto. 1999. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Jakarta.
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Tahun 2021-2024
- Sukardi. 2003. *“Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya”*. (Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara).
- Suradjiman. 1996. *“Ekonomi I Untuk Sekolah Menengah Umum”*. (Jakarta: Pusat Pembukuan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuanitatif, dan R&D*. (CV: Alvabeta, Bandung)

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Yusuf, Muri. 2017. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*”. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri).

Yogyakarta, P3EI UII. 2008. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada).

### **Artikel/Jurnal**

Cahya, Rifqi Fauzan Dwi. 2019. “*Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*”. (Jurnal; Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Januari).

Cahyani, Indah Nurul Ainun & Nur Aefih. 2021. “*Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan di Kelurahan Lompoe Kota Parepare*”. (Riset Ekonometrika; Institut Agama Islam Negeri Parepare: Parepare).

<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

<https://www.bps.go.id>

Yulhendri. 2017. “*Analisis Konfirmatory Faktor Pengukuran Indikator Kesejahteraan Rumah Tangga*”. Jurnal Ilmiah Econosains Vol. 15 No. 2 Agustus.

Zakariya, Novie Andriani Jurnal “*Distribusi Prespektif Muhammad Baqir Al-Sadr*”. (Surabaya: Program Studi Magister Ekonomi Syari’ah UIN Sunan Ampel Surabaya).

### **Skripsi**

Kartiawi. 2017. “*Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam*” (Studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Kanan)”. (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Lampung).

Putri, Febrina Eka Judul Skripsi. 2019. “*Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Menurut Ekonomi Islam*”. (Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum: Riau Pekanbaru).

Syahrhani, Judul Skripsi. 2016. “*Kontribusi Program Keluarga Harapan dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu*”. (Skripsi Sarjana; Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial: Makassar).







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.6180/In.39.8/PP.00.9/12/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR AEFIH  
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 08 JULI 2001  
NIM : 19.2400.040  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH  
Semester : VII (TUJUH)  
Alamat : JL. MP. REMMANG PADAELO, KELURAHAN LEMOE,  
KECAMATAN BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PENERIMA BANTUAN DI KELURAHAN LOMPOE PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 30 Desember 2022  
Dekan,



Muzalifah Muhammadun

SRN IP0000010



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 7/IP/DPM-PTSP/1/2023**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **NUR AEFIH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**  
 ALAMAT : **JL. MP. REMMANG PADAELO, LEMOE, KOPTA PAREPARE**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PENERIMA BANTUAN DI KELURAHAN LOMPOE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN BACUKIKI (KELURAHAN LOMPOE KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **03 Januari 2023 s.d 03 Februari 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **06 Januari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
 Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
 NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**

**KECAMATAN BACUKIKI**

**KELURAHAN LOMPOE**

Jl. Gelora Mandiri No. 01 Telp. ( 0421 ) 26986

**PAREPARE**

Kode Pos 91125

**SURAT KETERANGAN**

No : 148.3 / 88 / LPE

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **H. LA HUDDING, S.Sos**

**J a b a t a n** : LURAH LOMPOE

**N I P** : 19681113 199003 1 006

Menerangkan bahwa :

**N a m a** : **NUR AEFIH**

**Tempat tanggal lahir** : Parepare, 08 Juli 2001

**Pekerjaan** : Mahasiswi

**Universitas** : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

**Alamat Rumah** : Jl. MP. Remmang Padaelo RT.002/RW.003

Kel.Lemoe Kec.Bacukiki Kota Parepare

Bahwa yang bersangkutan diatas adalah benar Mahasiswi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE yang telah melakukan penelitian dengan judul "**ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAN PENERIMA BANTUAN DI KELURAHAN LOMPOE KOTA PAREPARE**" mulai tanggal 03 Januari 2023 Sampai tanggal 03 Februari 2023 sebagai kelengkapan dalam proses penyelesaian Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan saat ini telah menyelesaikan penelitian tersebut.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Februari 2023

**LURAH LOMPOE**



**H. LA HUDDING, S.Sos**

Nip. 19681113 199003 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NUR AEFIH

NIM : 19.2400.040

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JUDUL : DISTRIBUSI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARA  
KAT DI KELURAHAN LOMPOE PAREPARE (PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**A. Daftar pertanyaan untuk informan (Pendamping PKH Kelurahan Lompoe dan Koordinator PKH Dinas Sosial Parepare)**

1. Pada tahun berapa PKH ada di Kelurahan Lompoe ?
2. Berapa jumlah penerima PKH?
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan saat pertemuan kelompok penerima PKH? apakah pertemuan dilakukan secara rutin setiap bulan atau pada waktu tertentu saja?
4. Apakah ada kewajiban yang harus dilaksanakan penerima PKH agar tetap dikatakan sebagai penerima PKH?

5. Sanksi apa yang diberikan ketika peserta PKH tidak memenuhi kewajibannya?
6. Bagaimana sistem pendistribusian PKH ke masyarakat?
7. Ada berapa komponen pada penerima PKH?
8. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses sosialisasi dan distribusi terkait PKH?
9. Apakah pencairan dana PKH bersifat tunai atau non tunai? Dan berapa lama pencairan dana tersebut? Dan berapa nominal uang yang diterima peserta PKH?

**B. Daftar pertanyaan untuk informan (Penerima PKH Kelurahan Lompoe)**

1. Apakah ibu bekerja ? Jika ya, apa pekerjaan ibu?
2. Apa pekerjaan suami ibu?
3. Apakah penghasilan dari suami sudah memenuhi kebutuhan keluarga?
4. Sejak kapan ibu menerima bantuan PKH?
5. Apakah pencairan dana bantuan PKH tepat waktu?
6. Apakah sejak menerima bantuan PKH kehidupan ekonomi keluarga ibu menjadi lebih baik?
7. Apakah setelah menjadi KPM PKH kebutuhan pendidikan anak ibu, baik pokok maupun perlengkapan dapat terpenuhi
8. Apakah setelah menjadi KPM PKH kepedulian ibu terhadap kesehatan keluarga meningkat karena diberikannya akses layanan PKH?
- 9.

9. Apakah ibu merasa sejahtera setelah menerima bantuan PKH? Dan kesejahteraan seperti apa yang ibu rasakan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 30 Juni 2022

Mengetahui,-

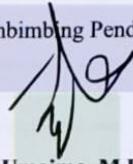
Pembimbing Utama



**Rusnana, M.Ag.**

NIP. 19680205 200312 2 001

Pembimbing Pendamping



**Umaima, M.E.I.**

NIP. 19890717 201801 2 002



PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santi  
Alamat : Jl. Ciubuloh  
Umur : 39  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Aefih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Di Kelurahan Lompoe Parepare**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2023

  
-----  
SANTI

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Kina  
Alamat : Jl. Gelora mandiri lamaubeng rw 000/rt 002  
Umur : 70  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Penjual beras

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Aefih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Di Kelurahan Lompoe Parepare**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Januari 2023

  
-----  
I Kina

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKHA  
Alamat : JLN. Liu-BULOe wekke-e  
Umur : 40  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Aefih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Di Kelurahan Lompoe Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2023

*Rikha*

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *MASNA*  
Alamat : *J.l. Lamnide*  
Umur : *70*  
Jenis Kelamin : *perempuan*  
Pekerjaan : *Penjual bolu kukat*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Aefih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Di Kelurahan Lompoe Parepare**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Januari 2023

  
-----  
*Masna*

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I CAWI  
Alamat : WEFKE 'e  
Umur : 50  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : IRT

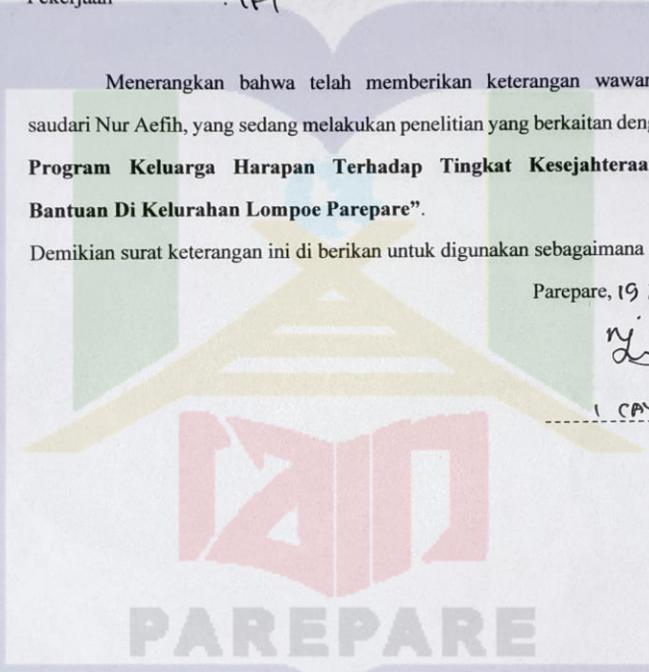
Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Aefih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Di Kelurahan Lompoe Parepare”**.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2023



I CAWI



IAIN  
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : i Reja  
Alamat : J. Lasangga rt 02 rw 02  
Umur : 81  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Penjual arang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Aefih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Di Kelurahan Lompoe Parepare**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Januari 2023



-----  
I REJA

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KATISMA  
Alamat : Jln. Lu buloe  
Umur : 29 tahun  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Aefih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Di Kelurahan Lompoe Parepare**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2023

  
-----  
KATISMA

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Salma Dg Baji*  
Alamat : *wakhaE*  
Umur : *35*  
Jenis Kelamin : *PEREMPUA*  
Pekerjaan : *Wirasaha*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Aefih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Di Kelurahan Lompoe Parepare**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2023

*Suz*  
-----  
*Salma Dg Baji*

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I PESSA  
Alamat : JL. GELOKA MANDIRI LAMAU BENE RW 009/RT 002  
Umur : 73  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Aefih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Di Kelurahan Lompoe Parepare**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Januari 2023

  
I PESSA

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

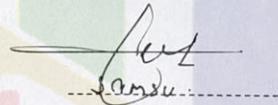
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHSY  
Alamat : Jl. NURUSSAMAWATI No 56  
Umur : 52  
Jenis Kelamin : L  
Pekerjaan : KOR KOT PKH KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Aefih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Di Kelurahan Lompoe Parepare**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Januari 2023



-----  
Saahsy

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURSIA  
Alamat : Jl. Belora Mandiri Lamaberg RW 008/RT 002  
Umur : 45  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Aefih, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penerima Bantuan Di Kelurahan Lompoe Parepare**".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Januari 2023

**PAREPARE**

## TRANSKRIP WAWANCARA

### A. Daftar pertanyaan untuk informan (Pendamping PKH Kelurahan Lompoe dan Koordinator PKH Dinas Sosial Parepare)

1. Pada tahun berapa PKH ada di Kelurahan Lompoe ?

“PKH di Kelurahan Lompoe sudah ada sejak awal tahun 2013” (Samsul Kordinator PKH Parepare).

2. Berapa jumlah penerima PKH?

“Jumlah yang menerima PKH itu yah kurang lebih 200san” (Samsul Kordinator PKH Parepare).

3. Kegiatan apa saja yang dilakukan saat pertemuan kelompok penerima PKH?

Jadi saya sebagai pendamping PKH di Kelurahan Lompoe bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada penerima bantuan PKH mengenai apa sebenarnya itu PKH. Bagaimana sistem pelaksanaannya, sebagai penerima apa yang harus mereka lakukan dan pada saat sosialisasi saya sudah menjelaskan dan untuk lebih memperdalam akan ada pembentukan kelompok yang dimana pertemuannya akan diadakan setiap bulan dengan materi yang berbeda-beda seputaran PKH pastinya. (Ibu Pipi Pendamping PKH Lompoe).

4. apakah pertemuan dilakukan secara rutin setiap bulan atau pada waktu tertentu saja?

“Iya dilakukan setiap bulan” (Ibu Pipi Pendamping PKH Lompoe).

5. Apakah ada kewajiban yang harus dilaksanakan penerima PKH agar tetap dikatakan sebagai penerima PKH?

Komitmen yang dimaksud disini adalah bagaimana mereka atau para penerima PKH benar-benar menjalankan kewajiban mereka selaku penerima PKH. seperti halnya ibu hamil, yah harus memeriksa kandungannya setiap tiga kali sebulan kalau tidak, akan mendapatkan teguran lisan sebagai peringatan awal. Anak sekolah pun seperti itu, kalau absensinya kurang dari 85% kehadiran maka apabila kejadian

tersebut masih terulang selama 3 bulan maka bantuan atau komponen yang diterima akan dicabut. Karna data anak sekolah itu yang input adalah dari pihak sekolah jadi langsung terbaca di pusat. (Ibu Pipi Pendamping PKH Lompoe).

6. Bagaimana sistem pendistribusian PKH ke masyarakat?

Pada tahap pendistribusian itu kembali lagi dipelaksanaan PKH dimana melakukan pendataan, pencocokan data, dilihat apakah datanya sudah valid apa belum, melakukan musyawarah, verifikasi, sosialisasi dan sebagainya. Harus sesuai prosedurlah. Dari pihak kelurahan yang menginput data warganya, kemudian ada pendampingan PKH oleh pendamping PKH. Dana PKH cair itu per triwulan dan tahapan pencairannya sampai tahap IV. Seperti terakhir ini dilaksanakan tanggal 12-27 Desember. ” (Samsul Kordinator PKH Parepare).

7. Ada berapa komponen pada penerima PKH?

Komponen di PKH itu ada 3 komponen kesehatan, pendidikan dan kensos atau kesejahteraan sosial. Pada setiap komponen harus memenuhi krietria dalam proses verifikasi berkas. (Ibu Pipi Pendamping PKH Lompoe).

8. Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses sosialisasi dan distribusi terkait PKH?

Alhamdulillah berbicara pada saat sosialasi ataupun masalah kendala pada saat sosialisasi adalah pertama bahasa, dikarenakan saya Bugis Soppeng juga jadi mungkin kurang paham atau mengerti. Kedua ada beberapa warga yang bekerja jadi informasi yang sampai ke warga yang tidak sempat ikut terkadang berbeda. (Ibu Pipi Pendamping PKH Lompoe).

9. Apakah pencairan dana PKH bersifat tunai atau non tunai? Dan berapa lama pencairan dana tersebut? Dan berapa nominal uang yang diterima peserta PKH?

Dana PKH cair itu per triwulan berupa uang tunai dan tahapan pencairannya sampai tahap IV. Seperti terakhir ini dilaksanakan tanggal 12-27 Desember. (Samsul Kordinator PKH Parepare).

## B. Daftar pertanyaan untuk informan (Penerima PKH Kelurahan Lompoe)

1. Apakah ibu bekerja ? Jika ya, apa pekerjaan ibu?

“Tidak nak saya hanya IRT” (Ibu Karisma penerima komponen pendidikan).

2. Apa pekerjaan suami ibu?

“Pembuat lemari nak” (Ibu Santi penerima komponen pendidikan).

3. Apakah penghasilan dari suami sudah memenuhi kebutuhan keluarga?

“Alhamdulillah nak mencukupi dan disyukuri” (Ibu Rika penerima komponen pendidikan).

4. Sejak kapan ibu menerima bantuan PKH?

Saya baru 2021 terima ini bantuan nak, saya yang sudah nenek-nenek ini untuk tambah penghasilan menjual kue bolu cukke nak. Alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah bersyukur nak. Uang kemarin cair alhamdulillah tepat waktu. (Ibu Masna penerima komponen lansia).

5. Apakah pencairan dana bantuan PKH tepat waktu?

Saya terima PKH dek sekitaran 4 tahun, alhamdulillah saya terima tepat waktu dek karna yang diterima itu per tiga bulan yang baru-baru saya terima itu uang dek tahap IV kemarin bulan Desember. Saya merasa alhamdulillah ada penambahan uang saku sekolah anak. (Ibu Salma Dg. Baji penerima komponen pendidikan).

6. Apakah sejak menerima bantuan PKH kehidupan ekonomi keluarga ibu menjadi lebih baik?

“Alhamdulillah dek saya bersyukur. Ada penambah uang sekolah untuk anak”. (Ibu Santi penerima komponen pendidikan).

7. Apakah setelah menjadi KPM PKH kebutuhan pendidikan anak ibu, baik pokok maupun perlengkapan dapat terpenuhi?

“Alhamdulillah bisa menambah uang jajan dan kuota sekolah anak saya, nak”. (Ibu Salma Dg. Baji penerima komponen pendidikan).

8. Apakah setelah menjadi KPM PKH kepedulian ibu terhadap kesehatan keluarga meningkat karena diberikannya akses layanan PKH?

“Iya nak, saat saya sakit juga biayanya gratis”. (Ibu Santi penerima komponen pendidikan).

9. Apakah ibu merasa sejahtera setelah menerima bantuan PKH? Dan kesejahteraan seperti apa yang ibu rasakan?

Saya dengan anakku terima dua-dua nak, dari 2013 itu kalau tidak salah saya terima nak dengan anakku. Begini kondisi tidak ada pekerjaan rawat anak juga. Kalau saya rasa alhamdulillah lancar nak, saya bersyukur bisa dapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau dibilang sejahtera nak alhamdulillah bisa dibilang seperti itu apa lagi saya sudah lama menerima, kalau orangtua yah alhamdulillah dicukupi nak. (Ibu I Pessa penerima komponen lansia).

## FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 2



Gambar 2 Wawancara dengan ibu I Cawi selaku penerima PKH komponen pendidikan.



Gambar 3 Wawancara dengan ibu Rika selaku penerima PKH komponen pendidikan.

Gambar 4 Wawancara dengan ibu Karisma selaku penerima PKH komponen pendidikan.

*Gambar 5 Wawancara dengan ibu Salma Dg. Baji selaku penerima PKH komponen pendidikan.*



*Gambar 6 Wawancara dengan ibu I Reja selaku penerima PKH komponen lansia.*



*Gambar 7 Wawancara dengan ibu I Kina selaku penerima PKH komponen lansia.*

*Gambar 8 Wawancara dengan ibu I Pessa selaku penerima PKH komponen lansia.*

**PAU**  
PAREPARE



*Gambar 9 Wawancara dengan ibu Santi selaku penerima PKH komponen pendidikan*



*Gambar 10 Wawancara dengan ibu Masna selaku penerima PKH komponen lansia*

PAREPARE

**DATA PENERIMA PKH TAHAP IV (Desember 12-27) 2022**

NO.	PELANGGAN	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
1	SUMINI. S	BTN TIMURAMA BLOK A26 / 5 RW 007 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
2	LABEDDU	JL. KAMPUNG JATI RW 009 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
3	DOLLA	JL. DRS H. SYAMSUL ALAM BULU RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
4	SARLINA	JL. LAMIDDE PUDE'E RW 003 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
5	RANY	JL. LIUBOLUE WEKKE'E RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
6	KARISMA	JL. LIUBOLUE NO. 53 A WEKKE'E RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
7	ZAINUDDIN	GELORA MANDIRI LAMAUMBENG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
8	YUSRENI	JL. GELORA MANDIRI LAMAUMBENG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
9	YATI	JL. GELORA MANDIRI LAMAUMBENG RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
10	WANI	KAMPUNG BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
11	USMAN	BTN LOMPOE MAS RW 000 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
12	TRIAN NURHAYATI	JL. GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
13	TASMA	JL. WEKKE'E RT 006 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
14	TANDI BATU	JL. GARUDA WEKKE'E RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
15	TAHIRA	JL. LAMINDENG PUDEE RW 003 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
16	TAHARIA	JL. GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
17	SYAHRUDDIN	KAMP JATI LOMPOE RW 000 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
18	SURYATI	JL.GELORA MANDIRI LAMAEMBUNG RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
19	SURYANI	JL. LIU BULOE LOMPOE RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
20	SURTINI	JL. MELINGKAR JATIRW 004 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
21	SURYANI	JL.GELORA MANDIRI LAMAEMBUNG RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
22	SURIANTI	BTN KOMDAN RW 000 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
23	SURIANTI	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI

24	SUMARNI	JL. MELINGKAR KAMPUNG JATI RW 000 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
25	SUKMAWATI	JL. LAMINDENG WEKKE'E RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
26	SUKARNI	JL. MELINGKAR KAMPUNG JATI RW 002 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
27	SUDARNI	JL. LAMINDENG PUDEE RW 003 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
28	ST. AMINAH	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
29	SRI WAHYUNI	JL. GELORA MANDIRI LAMAEMBUNG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
30	SITTI MALLI	JL. LAMIHADE RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
31	SITTI	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
32	SIRA	JL. GELORA MANDIRI RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
33	SIBE	KAMP BARU LABEMPA RW 001RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
34	SIAH	JL.KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
35	SERIAN TI	JL. LIUBULOE WEKKE'E RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
36	SARTIKA DEWI	JL. DRS H. SYAMSUL ALAM BULU RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
37	SARAWIAH	JL. DRS H. SYAMSUL ALAM BULU RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
38	SANTI	JL. KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
39	SANTI	JL. LABULOE NO. 53 RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
40	SANTI	JL. GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
41	SALMA DG. BAJI	JL. WEKKE'E RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
42	SALASIA	JL. LAMIDDE PUDE'E RW 003 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
43	SAHARIA	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
44	RUSNI	JL. TERE MASIKERANG WEKKE E RW002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
45	ROSDIANA	JL. GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
46	ROHANI MATTE	JL. LINGKAR RW 002 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
47	ROHANI	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
48	ROHANI	JL LASANGGA WEKKE RW 002 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI

49	ROHANA	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
50	RIKA	JL LIUBULOE RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
51	RHABHY	JL DRS SYAMSUL ALAM RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
52	REYNIL	JL GELORA MANDIRI RW 006 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
53	RATNAWATI	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
54	RASMIN	JL LIU BULOE RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
55	RASMI	JL LIU BULOE NO57 RW 002 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
56	RANTI	JL GARUDA WEKKEE RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
57	RAMLAH	JL GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
58	RAHMAYANI. B	JL LIU BULOE RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
59	QAMARIAH	JLDRS H SYAMSUL ALAM BULU RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
60	PUNDANG	KAMPUNG BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
61	PERA	JL JEND M YUSUF RW 006 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
62	PAUL	BTN LOMPOE MAS 1 BLOKM B RW 006 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
63	PATRI	JL DRS SYAMSUL ALAM RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
64	PARIDA	JL LAMIHADE RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
65	PALESANGI	JL MELINGKAR WEKKE'E RW 002 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
66	NURMIA	JL GARUDA WEKKEE RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
67	NURMA	JL GELORA MANDIRI LAMAU BENG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
68	NURLELANI	JL LAMMIDE WEKKEE RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
69	NURKIAH	JL DRS H SYAMSU ALAM BULU RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
70	NURHAYATI	JL MANSARUNA WEKKEE RW 002 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
71	NURHAYATI	JL GELORA MANDIRI WEKKEE RW 006 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
72	NURHANA	JL GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
73	NURHANA	JLLASANGGA KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI

74	NURCAYA	JL LASANGGA NO 33 A RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
75	NURAENI LAKENG	JL GELORA MANDIRI RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
76	NUR HAPSAH	JL DRS H SYAMSUL ALAM BULU RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
77	NUR ASMA AMIN	KAMPUNG BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
78	NOVIYA SUSANTI	JL LASANGGA NO 1 A WEKKEE RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
79	NETA	JL LASANGGA KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
80	NASRI ROSI	JL KOPERTIS WEKKE E RW 006 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
81	NASIRAH	JL LINGKAR BTN KODAM RW 000 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
82	NASARIAH	JL TERE MASSIKIRENG NO 93 WEKKEE RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
83	NANI	JL H SYAMSUL ALAM RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
84	NAMRI	WEKKEE RW 006 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
85	NAHARIA	JL PUDEE RW 003 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
86	MULIANI	JL LAMIHADE RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
87	MUHAMMAD TANG	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
88	MESRIA SENJAYA	BTN LOMPOE MAS 1 BLOK D-16 RW 000 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
89	MASNA	JL LAMMIDE RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
90	MARWAH	JL LASANGGA NO 33 RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
91	MARLIA	JL GELORA MANDIRI RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
92	MARINA	JL LASANGGA WEKKEE RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
93	MARIANIM	JL GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
94	MARIANA	JL LASANGGA RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
95	MARIANA	JL GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
96	MARHAWA	JL DRS SYAMSU ALAM BULU RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
97	MADE AMIN	JL LASANGGA KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
98	LUKMAN	JL DRS H A SYAMSUL ALAM BULU RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI

99	LAUPE	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
100	LATANG	JL LAMMIDE PUDEE RW 003 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
101	LASUPU	JL GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
102	LASISE	JL LIU BULOE WEKKEE RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
103	LASALIKE	JL LAMMIDE PUDEE RW 003 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
104	LAMONRI	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
105	LAHI	GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
106	KRISNA.M	JL GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
107	KAMBALO	JL GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
108	KAMARIA	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
109	KADARIA	JL GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
110	JUMRIAH	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
111	JUMIARDI	JL ELANG F-164 RW 005 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
112	JULIDA	JL GELORA MANDIRI NO55 RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
113	JIRAHANI	JL GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
114	JAWIAH	JL DRS H SYAMSUL ALAM BULU RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
115	JANNI	JL BTN TIMURAMA RW 007 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
116	JAMADE	JL GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
117	ISMAIL	JL GELORA MANDIRI RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
118	ISIA	JL LIU BULOE RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
119	ISANAWIAH	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
120	ISAKKA	JL MANSARUNA RW 002 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
121	IRMAWATI	JL DRS SYAMSUL ALAM LAMAUBENG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
122	IRMA	JL GELORA MANDIRI RW 006 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
123	IRMA	PERUM GRAND SULAWESI RW 000 RT 004	LOMPOE	BACUKIKI

124	IRIFA	JL GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
125	IRAWATI	JL TERE MASSIKIRENG WEKKEE RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
126	IRAMA	JL LAMMIDE PUDEE RW 003 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
127	INIKA	LAMAUBENG RW 007 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
128	INIDMA	JL LASANGGA RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
129	INENNI	KAMPUNG BARU LABEMPA RW 002 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
130	INANDENG	JL GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
131	INAMA	JL GELORA MANDIRI RW 002 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
132	INA OPITASARI	JL GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
133	IMULA	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
134	IMENENG	JL MELINGKAR NO86 WEKKEE RW 002 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
135	IMARI	JL GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
136	ILYANA	JL GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
137	IKINA	JL GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
138	IJIWA	JL KOPERTIS RW 006 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
139	JANI	JL LAMIHADE RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
140	IHATI	JL GELORA MANDIRI WEKKEE RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
141	IHAMI	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
142	IDUMARE	JLWEKKEE RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
143	IDUHA	JL MELINGKAR NO 82 WEKKEE RW 002 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
144	IDINA	WEKKEE NO 149 RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
145	ICINTA	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
146	ICAWI	JL LIUBULOE WEKKE E RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
147	IBUNGATI	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
148	IBRAHIM	JL GELORA MANDIRI PERUM SAWITTO BLOK NO2 RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI

149	IBECCE	JL LAMMIDE PUDEE RW 003 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
150	ITANI	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
151	I SEMMA	JL DRS SYAMSUL ALAM LAMMAUBENG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
152	REJA	JL LASANGGA NO 33 RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
153	PESSA	GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
154	I MENNENG	JL LASANGGA NO 9 C RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
155	I DALLE	JL LAMIHADE RW 007 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
156	HUSAINI	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
157	HERYATI SYARIF	JL GELORA MANDIRI RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
158	HERNA	JL LAMMIDE NO 44 RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
159	HASTUTI5	JL LIU BULOE NO 61 WEKKEE RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
160	HASNIA	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
161	HASNI	JL LASANGGA WEKKEE RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
162	HASNANI	JL KAMPUNG BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
163	HASNAH	JL GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
164	HASANUDDIN SAKE	JL JEND M YUSUF BELAKANG KODAM RW 000 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
165	HARTINA	JL DRS H SYAMSU ALAM LAMAUBENG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
166	HARTATI	JL DRS H SYAMSUL ALAM BULU RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
167	HARTATI	BTN GRAND SULAWESI BLOK K-43 RW 000 RT 004	LOMPOE	BACUKIKI
168	HANE	BTN TIMURAMA BLOK A 13-3 RW 007 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
169	HAMI	BTNTIMURAMA BLOK A 3-1 RW 007 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
170	HALIMAH	JL JEND MUH YUSUF WEKKEE RW 006 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
171	HALIJA	GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW 008 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
172	HAERUDDIN	JL LIU BULOE NO 55 RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
173	GUSTIAH	JL GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI

174	GUSNI	JL LASANGGA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
175	FITRIANI	JL DRS H SYAMSUL ALAM BULU RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
176	FITRI	JL LIUBULOE WEKKEE RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
177	FATMAWATI	BTN KODAM RW 000 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
178	ENCENG	JL LAMMIDE PUDE RW 003 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
179	ENCENG	JL KAMPUNG JATI RW 000 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
180	EMEL DIANSRI	JL LASANGGA KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
181	EDY RUSLAN	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
182	DIANA	JL GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW.008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
183	DARWISA	JL GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
184	DARSIA	JL JEND M YUSUF NO 39 RWN 006 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
185	DARMIAH	JL LAMMIDE WEKKE E RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
186	DAHLAN	JL LIU BULOE RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
187	CIHAMIN	BTN BUKIT SAWITTO RW 000 RT002	LOMPOE	BACUKIKI
188	BUNGAJARE	JL LIU BULOE NO 55 RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
189	BAHARIA	JL LGARUDA WEKKEE NO 13 RW 003 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
190	BAHARIA	JL LASANGGA NO 19 RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
191	BACO SITANA	JL SYAMSUL ALAM BULU NO 37 RW 008 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
192	AZWANY AZIS	KAMPUNG BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
193	AYU OLIVIA PELIPUR LARA	JL LIU BULOE RW 003 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
194	ASRIANI	JL LADSANGGA KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
195	ASNI	JL KAMPUNG JATI RW 000 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI
196	RIFIN	JL LASANGGA RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
197	ARIF	JLN HIKMA 2 RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
198	ANTI	JL GELORA MANDIRI RW 007 RT 003	LOMPOE	BACUKIKI

199	ANTI	GELORA MANDIRI LAMAUBENG RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
200	AMINAH	KAMPUNG BARU LABEMPA RW 001 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
201	AJARAE	JL GELORA MANDIRI RW 008 RT 001	LOMPOE	BACUKIKI
202	AGUSTINI	KAMP BARU LABEMPA RW 001 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI
203	AGUSSALIM SUTRI	PERUMAHAN GRIYA PAMULANG PERMAI BLOK D-19 RW 002 RT 002	LOMPOE	BACUKIKI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**BERITA ACARA  
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NUR AEFIH  
N I M : 19.2400.040  
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PENERIMA BANTUAN DI KELURAHAN LOMPOE, PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

DISTRIBUSI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LOMPOE PAREPARE (PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Rusnaena, M.Ag.

Parepare, 21 Februari 2023

Pembimbing Pendamping

Umaima, M.El.

Mengetahui;  
Dekan,

Dr. Muzdantah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197103082001122002

## BIODATA PENULIS



**Nur Aefih**, akrab disapa Efi, lahir di Parepare 08 Juli 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Bapak H. Juhri Mursida dan Ibu Hj. Intan Lakanna. Penulis mulai masuk pendidikan formal di SDN 31 Parepare pada tahun 2007-2013, kemudian masuk di SMPN 7 Parepare pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan lagi ke SMAN 2 Parepare pada tahun 2016-2019. Di tahun yang sama yaitu tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Dinas Perdagangan Parepare. Selain kuliah, penulis aktif mengikuti organisasi seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) 2020-2021 sebagai anggota kemudian menjabat sebagai sekretaris umum DEMA FEBI pada tahun 2022. Penulis juga mengikuti organisasi diluar kampus seperti IPPNU. Penulis juga mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM) bersama dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian penulis menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: *Distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lompoe Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)*.